



BPH Migas Siap Kawal 500 Lokasi BBM 1 Harga



Kepala BPH Migas
M. Fanshurullah Asa

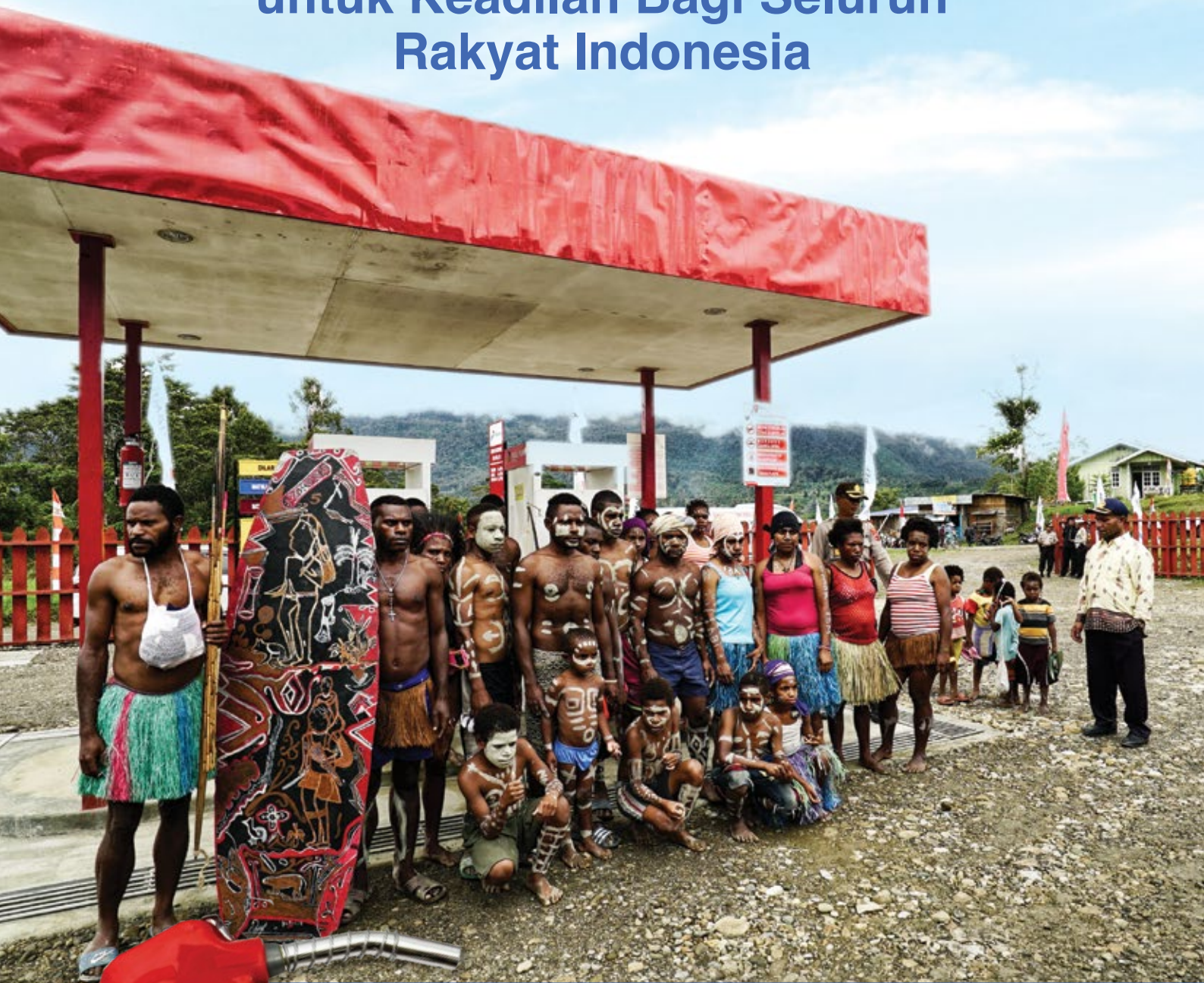
10 >> [sajian utama]
Dorong Daerah Realisasikan
Sub Penyalur BBM

24 >> [sorot]
Tindak Tegas Badan Usaha
yang Lalai Bayar Iuran

26 >> [beranda]
Penetapan Harga Jual Gas
pada Jaringan Gas Wujudkan
Rasa Keadilan

BBM Satu Harga

untuk Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia



Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Ady Mulyawan R.

Wakil Pimpinan Redaksi

Daman

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

I Ketut Gede Aryawan,
Idham Baridwan,
I Gusti Suarnaya Sidemen,
Bukhori Muslim, Anwar Rofiq,
Ayi Endan Harir, Muhammad
Rum Budi S., Dedy Wijaya

Editor

Narcicy Makalew, H Joko Kristadi,
Bagja Ramahtullah, Yosef G,
Dian Puspitasari

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Erna Sulastinah, Asas

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



BPH Migas Siap Kawal 500 Lokasi BBM 1 Harga

Pembentukan sub penyalur harus didukung berbagai pihak karena signifikan dalam mengimplementasikan penerapan BBM satu harga secara nasional, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Salah satu *stakeholder* yang dapat berperan nyata dalam mendorong keberadaan sub penyalur adalah pemerintah daerah (pemda). BPH Migas membuka kesempatan kepada pemda untuk menunjuk sub penyalur BBM. Langkah ini demi mendekatkan pasokan BBM berharga murah ke pelosok desa.

Kepala daerah dapat bertugas menetapkan sebaran titik sub penyalur BBM ke kawasan pelosok yang jauh dari jangkauan SPBU. Hal ini karena pemda setempat yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya yang menentukan titik-titik di mana sub penyalur berada sehingga pelaksanaannya dapat efektif. Dengan konsep ini pula, pemda juga bisa menekan praktek penyalahgunaan BBM yang membuat kelangkaan dan harga melonjak tinggi.

Selain itu, pemda bisa bekerja sama dengan pemilik *outlet* "Pertamini" yang kini menjamur di pelosok daerah. Sejumlah *outlet* "Pertamini" merupakan praktek ilegal karena tak punya payung hukum. Pasalnya, BBM tersebut berasal dari sumur-sumur minyak tua yang diolah masyarakat secara sederhana.

Pemda dapat berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk pemilihan sub penyalur agar efektif. BPH Migas pun menetapkan syarat bagi sub penyalur BBM, seperti izin lokasi, izin kegiatan usaha, kapasitas tangki timbun 3.000 liter, alat angkut BBM, dan kesesuaian jarak dengan SPBU.

Pendek kata, adanya sub penyalur merupakan salah satu solusi dan bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Isi



06-07

[sajian utama]
Mengawal Pelaksanaan
BBM Satu Harga

SPBU Kompak Program BBM Satu Harga yang ke-133 di Desa Waimangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, resmi berdiri pada Jumat (22/2/2019). BPH Migas terus mengawal program BBM Satu Harga dalam rangka mewujudkan tiga keadilan, yaitu Keadilan Ketersediaan, Keadilan Distribusi, dan Keadilan Harga di bidang energi khususnya Bahan Bakar Minyak pada daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar)

6 [sajian utama]
Mengawal Pelaksanaan BBM Satu Harga

8 Agar Lebih Tepat Sasaran, Kuota BBM Premium dan Solar Bersubsidi Tahun Ini Dikurangi

10 Dorong Daerah Realisasikan Sub Penyalur BBM

12 Masih Rendah, Konsumsi BBM Jenis Premium Tahun 2018

14 [galeri foto Hilir Migas]

18 [berita foto]

20 [sorot]
Perkuat Sinergi, Tindak Tegas Penyelewengan BBM Bersubsidi

22 Tindak Tegas Badan Usaha yang Lalai Bayar Iuran

24 [beranda]
Mendorong *Stakeholder* Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi

26 Penetapan Harga Jual Gas pada Jaringan Gas Wujudkan Rasa Keadilan

28 [ragam]
BPH Migas Gelar Serangkaian Sosialisasi Sub Penyalur

31 Serangkaian Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja BPH Migas

34 [lensa]
Rapat Kerja Tahun Anggaran 2019

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



22-23

[sorot]
Tindak Tegas Badan Usaha yang Lalai Bayar Luran

BPH Migas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengusulkan pembentukan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) di setiap daerah. Hal ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar.



26-27

[beranda]
Penetapan Harga Jual Gas pada Jaringan Gas Wujudkan Rasa Keadilan

BPH Migas menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa di tujuh kabupaten dan kota. Penetapan harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan daya beli masyarakat, usaha kecil dan kesinambungan badan usaha niaga gas bumi.



10-11

[sajian utama]
Dorong Daerah Realisasikan Sub Penyalur BBM

BPH Migas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengusulkan pembentukan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) di setiap daerah. Hal ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar.

Team Building Games BPH Migas

BPH Migas Mengadakan *Closing Meeting* Audit Internal Sistem Manajemen Integrasi

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bangka ke BPH Migas

Kepala BPH Migas Menjadi Narasumber di Universitas Brawijaya

Menghadiri Munas IX Hiswana Migas

FGD Gas Bumi di Sumatera Utara

Pengoperasian Terminal BBM Shell di Gresik

Achievment Motivation Training ke-13

Kunjungan Kerja ke Stasiun Metering Pertamina Gas Niaga

Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Luran Triwulan IV 2018

Penyaluran LTSHE di Kepulauan Meranti

Peresmian PJU-TS dan Penyerahan Secara Simbolis Sumur Bor Air Bersih

Arahan Menteri ESDM kepada Pegawai BPH Migas

Public Hearing Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Pengawasan Investasi Pada Pembangunan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Kepala BPH Migas Hadiri Peresmian BBM Satu Harga di Yalimo

Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi

13th Internasional Oil & Gas Conference Petrotech 2019

Peresmian BBM Satu Harga di Sumatera Barat

Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Sriwidjaja

Koordinasi Kuota BBM Subsidi Kereta Api di Tanjung Karang

Kunjungan Lapangan ke SPBB Muara Baru

Koordinasi Kuota BBM Subsidi bagi Pengguna Kereta Api

FGD Pengaturan Mini Penyalur dan Sub Penyalur

Peresmian Jargas untuk Rumah Tangga di Deli Serdang

RDP dengan Komisi VII DPR RI

SPBU Kompak Program BBM Satu Harga yang ke-133 di Desa Waimangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, resmi berdiri pada Jumat (22/2/2019). BPH Migas terus mengawal program BBM Satu Harga dalam rangka mewujudkan tiga keadilan, yaitu Keadilan Ketersediaan, Keadilan Distribusi, dan Keadilan Harga di bidang energi khususnya Bahan Bakar Minyak pada daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar)



Mengawal Pelaksanaan BBM Satu Harga

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak Satu Harga (BBM 1 Harga) sejak akhir 2016. Kebijakan itu mulai efektif berjalan awal 2017. Selama 2017-2018, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. telah membangun 131 titik BBM Satu Harga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Kebijakan BBM Satu Harga yang saat ini sudah menjangkau 133 titik di lokasi-lokasi terisolir yang sulit dijangkau merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sektor energi dan sumber daya mineral.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, SPBU Kompak satu harga ini, kata Fanshurullah, lebih banyak dibangun di wilayah Papua dan Papua Barat dari seluruh Indonesia.

"Ini adalah bagian dari hadirnya sumber energi yang berkeadilan. Apalagi kita tahu wilayah Papua memiliki sumber daya yang cukup besar dan hasilnya banyak digunakan untuk negara ini. Sehingga, pemerintah pusat juga berkomitmen untuk mengembalikan hasil sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar dia di lain kesempatan.

Optimis target tercapai

BPH Migas yakin target untuk membangun 160 penyalur BBM Satu Harga selama 2017-

2019 bisa terlaksana. Pasalnya, hanya tinggal 29 titik penyalur baru yang perlu dibangun pada tahun 2019 untuk bisa menggapai target tersebut.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Isa memaparkan sebaran 29 titik BBM Satu Harga yang akan dibangun sepanjang tahun ini. Yakni sembilan titik penyalur di Kalimantan, sembilan titik di Nusa Tenggara Timur (NTT), enam titik di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta lima titik di Maluku dan Maluku Utara.

Dari jumlah itu, Fanshurullah mengatakan bahwa Pertamina sudah siap di dua lokasi, yakni di Maybrat Papua dan NTT. Meski demikian, menurut Fanshurullah pihaknya masih menerima usulan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk melakukan penambahan atau pergeseran lokasi sesuai dengan kajian yang dilakukan. "Kalau ada usulan, bisa kita evaluasi," kata Fanshurullah.

Dengan berkaca pada capaian tahun 2018, Fanshurullah bahkan meyakini, tambahan 29 titik baru BBM Satu Harga ini bisa direalisasikan lebih cepat dalam semester pertama tahun ini.

"Ini target kebut, nggak usah nunggu akhir tahun, mudah-mudahan bisa diresmikan sebelum Juni," ujarnya.

Realisasi penyalur BBM Satu Harga hingga tahun 2018 memang sedikit di atas target.

Fanshurullah mengungkapkan, dari 130 titik target yang dipatok pemerintah, sepanjang tahun lalu program ini sudah berada di 131 lokasi wilayah Terdepan, Terluar dan tertinggal (3T).

Sebanyak 131 titik itu tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 29 penyalur, 33 penyalur di Pulau Kalimantan, 14 penyalur di Pulau Sulawesi, 11 penyalur di Pulau Maluku dan Maluku Utara, 26 penyalur di Pulau Papua dan Papua Barat, 14 penyalur di Pulau NTB dan NTT, 1 penyalur di Pulau Bali, dan 3 penyalur di Pulau Jawa dan Madura.

Total volume yang sudah disalurkan sejak tahun 2017-2018 ialah sebesar 109.422 kilo liter (KL) dengan nilai Rp 653,06 miliar. Terdiri dari 40.547 KL volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dengan nilai Rp 208,81 miliar, dan 68.875 KL volume Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dengan nilai Rp 444,24 miliar.

Sementara itu, dari sejumlah 131 titik tersebut, ada 57 penyalur yang dibangun pada tahun 2017, dengan rincian 54 dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga oleh PT AKR Corporindo. Sedangkan sepanjang tahun 2018, ada 74 penyalur yang dibangun, dimana 68 titik dibangun oleh Pertamina, dan sisanya oleh AKR. Jumlah itu pun ditambah dengan 1 titik penyalur Pertamina yang merupakan percepatan



Empat lapis pengawasan

Mewujudkan harga bahan bakar minyak yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Joko Widodo yang terus diupayakan untuk diwujudkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan harga BBM yang sama (energi berkeadilan).

Komite BPH Migas memastikan pengawasan terhadap pendistribusian BBM yang dilakukan secara bertingkat. Pertama adalah dengan pengawasan dilakukan oleh penerima pengawasan.

"Pertamina atau AKR wajib melakukan pengawasan kepada SPBU yang menerima distribusi," ungkap Komite BPH Migas Jugi Prajugio usai acara Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja di Hall Hotel Grand Mahkota Lamongan, Rabu (13/1/2019).

Selain itu, BPH Migas juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar turut mengawasi. Jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah itu disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jugi menambahkan, BPH Migas juga turut melakukan pengawasan khususnya BBM satu harga.

Pemerintah tidak ingin terjadi BBM satu harga itu baru dikirim dari Pertamina tapi sudah habis karena diambil pengecer-pengecer.

"Melalui MoU, kita bekerja sama dengan kepolisian untuk turut melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM," tandasnya.

Dengan dibantu polisi, Pertamina akan memperketat pengawasan di SPBU, yang langsung untuk konsmen tidak boleh diperjualbelikan lagi untuk disalurkan ke pengecer dan lain-lain, terutama BBM yang bersubsidi.

"Jika ada SPBU yang terbukti melanggar, akan dijatuhi sanksi yang berat berupa peringatan sampai dengan penghentian pasokan," kata *Marketing Operation Region V* Toni Pradana.

Sementara itu, Nasyrul Falah Amru Anggota Komisi VII DPR RI turut mendorong agar pendistribusian BBM tepat sasaran. Ia juga meminta Pertamina supaya melakukan pendistribusiannya dengan baik, jangan sampai masyarakat yang membutuhkan solar keteteran tidak bisa mendapatkan. ★

dari target tahun 2019, namun telah beroperasi pada tahun 2018.

Adapun, mengenai biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu panyalur atau Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), belum ada yang menyampaikan rinciannya. Hanya saja, *External Communications Manager* Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, rata-rata investasi yang harus disiapkan Pertamina untuk membangun satu SPBU berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Arya menjelaskan, besaran investasi tersebut bergantung dari model SPBU dan lokasi pembangunannya.

"(Investasi) bervariasi, beragam tergantung model SPBU dan lokasinya, seperti akses wilayah dan infrastruktur," kata Arya.

Di lain sisi, menurut Fanshurullah, BBM Satu Harga yang sudah tersebar di 131

titik itu dapat menjangkau 421.955 keluarga atau bisa dinikmati oleh kurang lebih 2 juta warga di wilayah 3T. Ia pun mengklaim, program yang ditujukan untuk menyetarakan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar ini telah mendatangkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Fanshurullah pun mengatakan bahwa BPH Migas dengan lembaga terkait seperti Bappenas dan BPS tengah menyiapkan kajian khusus mengenai dampak ekonomi terhadap warga yang terjangkau oleh program BBM Satu Harga ini. Kajian itu ditargetkan bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

"Jadi supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada korelasi BBM Satu Harga terhadap pertumbuhan ekonomi (daerah yang terjangkau program)," tandasnya.



Agar Lebih Tepat Sasaran, Kuota BBM Premium dan Solar Bersubsidi Tahun Ini Dikurangi

Kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu, kuota bahan bakar beroktan 88 itu bisa mencapai 11,8 juta kiloliter (KL), kini hanya 11 juta KL. Kuota itu turun karena mengacu pada serapan tahun 2018 yang hanya 9,23 juta KL.



Tak hanya Premium, kuota Solar bersubsidi pun dipangkas. Tahun ini, kuota Solar hanya 14,5 juta KL. Padahal, tahun lalu kuantanya 15,5 juta KL dengan realisasi serapan solar tahun lalu sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Realisasi dua bulan awal tahun ini

Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengatakan, kuota Solar dipangkas agar penyalurannya tidak disalahgunakan. Apalagi, sudah ada beberapa kasus mengenai penyelewengan BBM Solar bersubsidi. Jadi, dengan kuota lebih sedikit harapannya bisa lebih tepat sasaran.

"Subsidi kan harus kami awasi betul-betul ya karena ada uang negara," kata Ibnu baru-baru ini.

BPH Migas pun berencana untuk membuka kantor cabang di daerah agar bisa lebih mudah mengawasi distribusi



dan pengawasan BBM di daerah. Dengan begitu bisa menekan adanya praktik penyelewengan BBM. Rencananya kantor cabang akan dibuka tahun ini. Namun hal itu masih menunggu revisi Perpres Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas.

"Pengawasan akan lebih intens," kata Ibnu.

Sementara itu, kuota BBM penugasan atau Premium berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 tercatat sebesar 11 juta KL. Dari jumlah tersebut, realisasi penyerapan di Januari-Februari untuk BBM jenis Premium sebesar 1,8 juta KL. Angka penyerapan tersebut setara 16,75 % dari total kuota.

Dari jumlah 11 juta KL tersebut, kuota BBM Premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada tahun ini sebesar 4,45 juta KL atau 17,28 % dari keseluruhan alokasi. Adapun pada Januari-Februari, penyerapan Premium untuk wilayah Jamali sudah sebesar 0,77 juta KL.

"Sementara kuota Premium non-Jamali 2019 pada Januari-Februari 1,0 juta KL," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung DPR, Senin (18/3).

BPH Migas juga mencatat konsumsi BBM jenis Premium dan Pertamina Dex naik selama libur Natal 2018 dan tahun baru 2019. Peningkatan konsumsi Premium karena bahan bakar beroktan 88 itu sudah diperluas. Dari data Satuan Tugas (Satgas), rata-rata konsumsi Premium mulai 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, mencapai 33.990 Kiloliter (KL) dengan nilai tertinggi 40,3 ribu KL dan terendah 21,7 ribu KL. Capaian itu meningkat sekitar 8% dari konsumsi pada hari normal sekitar 31.267 KL.

Ibnu Fajar mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 yang mewajibkan penjualan Premium di Jamali menyebabkan konsumsi meningkat.

"Karena ada Peraturan Presiden yang baru. Dulu, Premium hanya berlaku di luar Jamali, sekarang Jawa masuk," katanya.

Selain Premium, rata-rata konsumsi Pertamina Dex meningkat 4,7% dari hari normal. Penyebabnya karena selama liburan, banyak masyarakat menggunakan mobil pribadi dan mengkonsumsi Solar nonsubsidi. Berbeda dengan Premium dan

Pertamina Dex, konsumsi Peralite justru turun 15,% dari konsumsi harian normal. Pertamina dan AKR 92 juga turun 2,7% dari konsumsi harian normal. Pertamina Turbo turun 7,7%, Dexlite turun 53,2%, minyak tanah turun 4,4%, dan Avtur turun 4,4%.

Satgas juga mencatat ada penurunan konsumsi elpiji selama natal dan tahun baru. Penyaluran elpiji kepada rumah tangga turun 3,2% menjadi 20.631 MT dari kondisi normal 28 ribu MT.

Terkait penerimaan, hingga 15 Maret 2019 lalu, Fanshurullah menyampaikan, realisasi dari penerimaan negara sebesar Rp327 miliar atau 48% dari target Rp678 miliar. Penerimaan ini didapatkan dari sektor BBM. Sementara di sektor gas, sampai 15 Maret 2019 realisasinya Rp85 miliar (31%) dari target Rp272 miliar.

Penurunan harga BBM

Pemerintah sendiri memutuskan menurunkan harga BBM pada Minggu (11/2). Tak hanya bensin Peralite dan Pertamina, harga Premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) juga diturunkan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan penurunan ini seiring dengan menurunnya harga keekonomian BBM tersebut. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penurunan harga Premium di Jamali dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan harga keekonomian BBM tersebut.

"Jadi, secara keseluruhan, bahwa Premium untuk Jamali turun Rp100 per liter," ujarnya di Gedung DPR, Senin (11/2).

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian ESDM, beberapa indikator dalam formula harga BBM mengalami penurunan. Meski begitu, dia tidak menyebutkan apa saja indikator dalam formula perhitungan BBM yang mengalami penurunan dan berapa harga keekonomian Premium saat ini.

Sebelumnya, ada selisih harga yang lebih mahal antara harga bensin Premium. Harga Premium di Jamali ditetapkan sebesar Rp6.550 per liter, sedangkan di luar Jamali sebesar Rp6.450 per liter. Sejak Minggu (10/2), pemerintah memutuskan

menurunkan harga Premium di Jamali sebesar Rp100 per liter, sehingga harga BBM tersebut sama di seluruh Indonesia.

Premium merupakan jenis BBM penugasan, meski tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, badan usaha yang diberikan penugasan, yakni Pertamina, berhak mengajukan penggantian atas selisih dari harga pasar dengan harga penugasan. Menurutnya, pemerintah tidak wajib membayar selisih tersebut.

Keputusan pemerintah membayar selisih harga ini tergantung hasil audit keuangan Pertamina dan ketersediaan anggaran negara. Salah satu alasan pemerintah menurunkan harga Premium adalah harga minyak dunia yang turun beberapa waktu belakangan. Harga minyak dunia berdasarkan acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) terus berfluktuasi dan berpengaruh pada perhitungan formula harga Premium. Kementerian ESDM pun telah mengajukan perubahan formula harga Premium ini kepada Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramsion Siagian menanggapi paparan Pemerintah terkait penurunan harga BBM jenis Premium ini. Dia mengapresiasi langkah pemerintah ini, yang penting ketersediaan BBM juga harus diperhatikan.

"Okelah harga turun, tapi jagain suplainya, di beberapa daerah tidak ada," ujarnya.

Menanggapi soal ketersediaan bensin Premium, Direktur utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan saat ini pasokannya masih aman. Tahun ini kuota penyaluran Premium sudah ditetapkan sebesar 10,5 juta KL, sama dengan jatah tahun lalu. Dia meminta masyarakat melaporkan jika ada kelangkaan. Saat ini Pertamina telah membuka layanan pengaduan (call center) 135 yang dapat melayani pertanyaan seputar ketersediaan BBM.

"Selama ini kami juga memonitor kan, apalagi sekarang ada call center 135. Dilaporkan saja kalo ada kelangkaan," ujar Nicke pada kesempatan yang sama.

Dia juga memastikan penurunan harga BBM, tidak akan ada masalah keuangan di Pertamina. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menyatakan telah memperhitungkan dengan matang, terkait penurunan harga terhadap keuangan Pertamina. ★

Dorong Daerah Realisasikan Sub Penyalur BBM

BPH Migas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengusulkan pembentukan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) di setiap daerah. Hal ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar.

“Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan pembentukan sub penyalur di daerahnya, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan BBM subsidi dengan harga yang terjangkau,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur di Pontianak, Kamis (7/3/2019).

Baru 25 sub penyalur

Fanshurullah mengatakan, sampai saat ini, di Indonesia baru ada 25 sub penyalur. Di Kalimantan Barat, baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya yang telah memiliki sub penyalur dan berada di Kecamatan Baru Ampardan Padang Tikar. Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan pemerintah daerah lainnya bisa mengikuti jejak Pemkab Kubu Raya.

“Saat ini, sudah ada 250 pemda yang mengajukan pembentukan Sub Penyalur, sehingga kita akan menyeleksi pangajuan tersebut, karena kita harus hati-hati dalam menentukan sub penyalur, agar BBM subsidi yang disalurkan tersebut bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Fanshurullah menjelaskan, pembentukan sub penyalur BBM tersebut merupakan amanat UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 di mana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh NKRI.

“Dalam hal ini, BPH Migas ditugaskan oleh UU untuk mengatur ketersediaan sub penyalur tersebut. Sampai saat ini, jumlah SPBU yang ada di Indonesia hanya sekitar 7.400, sementara jumlah desa dan kelurahan ada 85 ribuan, sehingga ketersediaan SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat masih sangat



terbatas, sehingga diperlukan sub penyalur dan mini SPBU,” kata dia.

“Ini mesti ada ketersediaan, kalau dipaksa dibangun penyalur SPBU, tidak mungkin, karena itu menggunakan pola investasi. Maka jalan tengahnya, dibangun dua yakni Sub Penyalur dan Pertashop,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyambut baik sosialisasi yang digelar BPH Migas tersebut dan meminta kepada pemda untuk segera mengajukan pembentukan sub penyalur tersebut.

“Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi, memang diperlukan sub penyalur dan apa yang dilakukan BPH Migas diharapkan bisa mendorong pemda untuk segera melakukan hal itu,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat (Kalbar) Muhammad Ridwan yang mewakili Gubernur Kalbar untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurhaman menambahkan, pihaknya akan terus

melakukan pengawasan terhadap pembentukan sub penyalur BBM ini agar bisa tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jika ini bisa segera terlaksana akan segera bisa berimplementasi secara positif dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya ini juga menjadi tanggung jawab bagi DPR, khususnya Komisi VII untuk memberikan pengawasan agar program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata dia.

Membuka kesempatan

BPH Migas sendiri membuka kesempatan kepada pemda untuk menunjuk sub penyalur BBM. Langkah ini demi mendekati pasokan BBM berharga murah ke pelosok desa.

Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, kepala daerah bertugas menetapkan sebaran titik sub penyalur BBM ke kawasan pelosok yang jauh dari jangkauan SPBU. Menurut dia, lokasi SPBU, dalam konteks ini berbicara, di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum ideal menjangkau semua masyarakat sampai ke pelosok.

Jugi menuturkan cara semacam itu untuk menekan praktek penyalahgunaan BBM yang membuat kelangkaan dan harga melonjak tinggi.

“Jumlah titik sub penyalur diserahkan ke bupati. Sub penyalur ini untuk mendekati BBM harga murah ke masyarakat pelosok. Tentunya bisa menekan pelangiran,” ucap Jugi Prajogio ketika sosialisasi sub penyalur BBM di Hotel Aston Banua, Kamis (7/2/2019).

Masih menurutnya, pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan pemilik outlet



Pertamini yang kini menjamur di pelosok daerah. Sebab, kata Jugi, outlet "Pertamini" merupakan praktek ilegal karena tak punya payung hukum. Pasalnya, BBM tersebut berasal dari sumur-sumur minyak tua yang diolah masyarakat secara sederhana.

"Saya sering sekali menerima laporan dari polisi mengenai tangkapan BBM ilegal yang berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi. BBM ilegal itu berasal dari sumur-sumur tua yang diolah masyarakat secara sederhana," kata Komite BPH Migas Hendry Ahmad di kesempatan lainnya.

BBM ini didistribusikan kepada masyarakat dengan nama produk-produk Pertamina, seperti Peralite atau Minyak Tanah. BBM versi Peralite ternyata diberi pewarna.

"Produk BBM ilegal ini dijual ke Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Medan, dan Aceh. Ini lingkaran mafia," sebut Hendry.

BBM hasil olahan tradisional ini dijual dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 di tempat asalnya. Inilah Peralite di sepanjang jalan yang dijual eceran yang diberi nama Pertamina.

"Jadi, tidak masuk akal Peralite kualitasnya lebih rendah dari Premium. Kami minta aktivitas ini ditindak," pinta Hendry.

Terkait hal ini, kata Jugi, "Pemda bisa merangkul 'Pertamini'. Kalau jadi sub penyalur BBM, statusnya resmi karena ditunjuk bupati".

Bisa menggunakan dana desa

Jugi mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk pemilihan sub penyalur agar efektif. BPH Migas menetapkan syarat bagi sub penyalur BBM, seperti izin lokasi, izin kegiatan usaha, kapasitas tangki timbun

3.000 liter, alat angkut BBM, dan kesesuaian jarak dengan SPBU.

BBM yang dijual sub penyalur mengacu jarak tempuh dengan SPBU terdekat. Jugi mencontohkan jarak minimal 30 kilometer, maka ada kenaikan Rp500 per liter. Apabila lebih dari 30 kilometer, kata Jugi, sub penyalur bisa melego BBM dengan margin antara Rp1.000-Rp 1.500 per liter.

Margin harga BBM di tingkat sub penyalur ditetapkan oleh bupati. Menurut dia, pola semacam ini juga diterapkan untuk menentukan HET LPG 3 kilogram melalui keputusan bupati. Jugi mempersilakan warga yang berminat jadi sub penyalur BBM segera berkoordinasi dengan bidang perekonomian setiap pemerintah kabupaten/kota.

Sebanyak 100 sub penyalur BBM diberikan ke pemda, tapi harus koordinasi BPH Migas dan Pertamina dimana lokasi titik penyalur sehingga efektif. Bumdes bisa masuk. Ijin lokasi Di waktu lampau masih hambatan, harus dipermudah. Tapi jumlah titik harus koordinasi di mana yang paling cocok dan paling bagus agar mendapat BBM murah.

"Sub penyalur ini melayani konsumen yang sudah terdaftar," katanya.

Ia optimis masyarakat di pelosok daerah bisa mendapatkan harga BBM murah ketimbang beli di Pertamina atau pengecer lain.

Sementara itu, Fanshurullah Asa meminta dukungan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo untuk menggunakan dana desa sebagai back-up mewujudkan BBM satu harga. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Kegiatan Penyaluran BBM, Gas dan LPG.

"Melalui Permen Nomor 13, yang tiga minggu lalu (diterbitkan). Sudah ada

aturan mengenai sub penyalur, maka kami minta dukungan dari DPR. Karena kita tahu ada dana desa satu desa Rp 1,5 miliar melalui regulasi yang ada bisa digunakan untuk mem-backup BBM satu harga ke sub penyalur tadi," jelas Fanshurullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/3/2019).

Dia berpendapat, penggunaan dana desa bisa dialokasikan untuk membangun sub penyalur BBM. Ongkos angkut dari penyalur atau dadi ke sub penyalur yang ada di desa akan ditentukan oleh bupati di daerah masing-masing. Kata Fanshurullah, medan setiap daerah berbeda-beda.

"Untuk di Asmat misalnya, dia harus menyalurkan pakai kapal lewat laut itu bupati yang akan cek dan di sana ditetapkan ongkos penyalurnya Rp1.500 sedangkan di Selayar ongkosnya Rp5.00," jelasnya.

Menurutnya, agar bisa menjadi sub penyalur, biaya investasinya hanya Rp 60 juta hingga Rp 100 juta. Menurut hitung-hitungan BPH Migas modalnya bisa kembali setelah 2,5 tahun beroperasi.

"Investasi Rp 60-100 juta kita hitung sekitar 2,5 tahun sudah balik modal," ujarnya.

Di samping itu, untuk status kepemilikan sub penyalur juga bisa dimiliki oleh swasta juga koperasi lewat badan usaha milik desa/bumdes. Apabila sub penyalur dibangun oleh bumdes, maka nantinya sub penyalur tersebut akan jadi aset milik desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jugi. Ia berujar, "BUMDes bisa masuk. Tapi jumlah titik sub penyalur harus koordinasi dengan Pertamina, dimana yang paling cocok dan paling bagus agar masyarakat dapat BBM murah". ★

Masih Rendah, Konsumsi BBM Jenis Premium Tahun 2018

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium masih rendah. Badan Pengatur Hilir minyak dan gas (BPH Migas) mencatat pada 2018 realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) alias Premium 78,61% dari dari kuota yang ditetapkan. Pemerintah sebelumnya menetapkan kuota penyaluran Premium di 2018 sebesar 11,8 juta kilo liter (KL). Sementara realisasinya hanya 9,27 juta KL.

"Secara nasional realisasi volume pengaliran JBKP Premium tahun 2018 adalah 78,61%," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dia menjelaskan untuk realisasi konsumsi Premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) 2,78 juta KL. Angka itu 64,63% dari kuota yang ditetapkan 4,3 juta KL. Sementara untuk wilayah non Jamali realisasi konsumsi Premium 6,5 juta KL. Angka itu 86,63% dari kuotanya 7,5 juta KL. Untuk 2019 sendiri kuota untuk Premium ditetapkan lebih rendah, yakni 11 juta KL. Dari Januari hingga Februari 2019 konsumsi Premium baru 1,8 juta KL.

"Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas adalah dengan pengawasan terhadap penyalur premium dengan memastikan melakukan

penyaluran sesuai penugasan," kata Fanshurullah.

Naik saat libur nataru

Meski secara keseluruhan mengalami penurunan, BPH Migas melaporkan adanya kenaikan konsumsi BBM jenis Premium dan Pertamina Dex selama libur Natal 2018 dan tahun baru 2019 atau sering disingkat nataru. Untuk BBM Premium, kenaikan konsumsi terjadi karena pasokannya yang diperluas di SPBU-SPBU Jamali.

Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 yang mewajibkan penjualan Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menyebabkan konsumsi meningkat.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas), rata-rata konsumsi Premium pada periode 18 Desember 2018 sampai 8 Januari 2019

mencapai 33.990 kiloliter (KL) dengan nilai tertinggi 40,3 ribu KL dan terendah 21,7 ribu KL. Itu artinya, ada peningkatan sekitar 8 persen dari konsumsi pada hari normal sekitar 31.267 KL.

"Karena ada Peraturan Presiden yang baru. Dulu, Premium hanya berlaku di luar Jamali, sekarang Jawa masuk," kata dia dalam pemaparan konsumsi BBM selama Nataru 2019 di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (8/1).

Sementara untuk konsumsi Pertamina Dex ada peningkatan sebesar 4,7 persen dari penjualan di hari normal. Ibnu menjelaskan, peningkatan terjadi karena selama liburan banyak masyarakat menggunakan mobil pribadi dan mengisinya dengan solar bernonsubsidi ini.



Pada periode yang sama, BBM jenis Peralite justru turun 15 persen dari konsumsi harian normal. Pertamax dan AKR 92 juga turun sebesar 2,7 persen, Pertamax Turbo turun 7,7 persen, pun dengan Dextrite turun 53,2 persen. Di periode yang sama, konsumsi minyak tanah pun turun 4,4 persen dan Avtur turun 4,4 persen.

Tak hanya BBM, Satgas juga mencatat adanya penurunan konsumsi elpiji selama Natal dan tahun baru. Penyaluran elpiji kepada rumah tangga turun 3,2 persen menjadi hanya 20.631 metrik ton (MT) dari konsumsi di hari normal sebanyak 28 ribu MT.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, selama masa tugas 22 hari itu tidak ada kelangkaan BBM dan elpiji. Dia menjelaskan, kondisi ini karena ada tambahan pasokan seperti Premium stoknya mencapai 21 hari, Peralite 22 hari, Solar 24 hari, Pertamax Turbo 77 hari, Pertamax 26 hari, Pertamina Dex 29 hari, Dextrite 27 hari, Avtur 30 hari, dan elpiji 19 hari.

"Kondisi ketersediaan (stok) BBM selama masa Posko Nasional ESDM normal dan tidak terjadi kelangkaan BBM," kata dia.

Kata dia, selama masa satgas bertugas tercatat adanya bencana seperti musibah gempa dan tsunami Selat Sunda pada 22 November 2018 lalu. Bencana alam ini memberi dampak terhadap penyaluran BBM dan Elpiji selama masa satgas di area Banten.

Dari data BPH Migas, akibat musibah tsunami itu terdapat 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) milik AKR di Sumur Pandeglang Banten yang belum beroperasi hingga kini dan masih dalam proses pembenahan. Selain itu, ada kerusakan fasilitas elpiji akibat tsunami di Banten yakni Marine Loading Arm (MLA).

"Kemarin kita cukup kelabakan juga untuk atasi hal itu. Tapi kami kebut untuk BBM, LPG dan listrik," tuturnya.

Secara perlahan akan diperkecil

Pada sebuah kesempatan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyampaikan, "Seiring



dengan perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk dan industri, maka pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan jaringan pipa gas nasional yang terintegrasi. Selain itu, Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI.

Ridwan mengatakan, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 67 Tahun 2002, badan pengatur penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi atau yang dikenal dengan BPH Migas, tugas dan fungsinya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang

ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI, serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

"Saat ini, distribusi BBM di luar SPBU terus berkembang, baik yang sudah ada dasar legalitasnya maupun yang belum ada legalitasnya, seperti Pertamina dan semacamnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan keselamatan dan keberlangsungan distribusi BBM, maka BPH Migas perlu mengambil langkah-langkah operasional dan antisipatif sesuai fungsi agar konsumen tidak dirugikan, dan hal-hal negatif lainnya," tutur Ridwan.

Dikatakannya, keberadaan BBM jenis premium sebenarnya secara perlahan akan diperkecil alokasinya dan digantikan oleh Peralite dan Pertamax, mengingat harga jual Premium lebih rendah dari biaya produksi dan distribusinya. Bahkan ada kebijakan Premium tidak lagi dijual di SPBU, rest area jalan tol, dan SPBU tertentu di Pulau Jawa. Akibatnya, badan usaha yang ditugaskan, dalam hal ini Pertamina, harus bersubsidi dari kas internal perusahaan untuk menutupi biayanya.

"Faktanya, sebagian masyarakat masih sangat membutuhkan (Premium). Karena selisih harga Peralite dan Pertamax masih cukup signifikan. Setiap droping Premium datang di SPBU, maka dalam waktu singkat habis terjual. Hal ini terjadi di wilayah Jamali dan di luar Jamali. Oleh karenanya, kami ingin mengetahui bagaimana BPH Migas menyikapi hal ini, dan bagaimana pula kebijakannya ke depan," ungkap Ridwan. ★





galeri foto **Hilir Migas**



Sumpah Jabatan dan Plantikan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Mineral dan Pejabat Administrasi - 6 Februari 2019.



Peresmian Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Kabupaten Banyuasin - 21 Februari 2019



Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*) BPH Migas tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di 7 Wilayah Kabupaten/Kota - 19 Februari 2019



Peresmian SPBU Kompak 86.977.17 Desa Togola Wayoli, Kec. Ibu Tengah, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara



galeri foto **Hilir Migas**

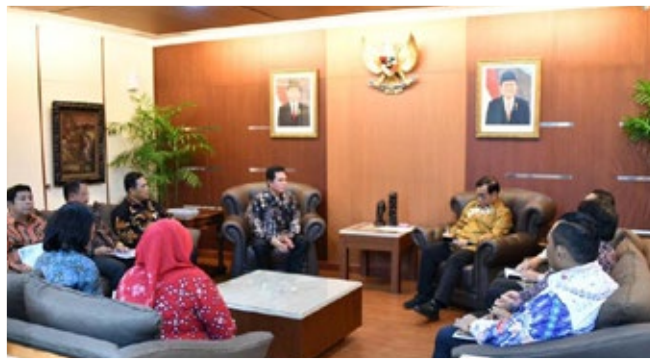


★ Sosialisasi Konsep Pengaturan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dan Rencana Pengembangan Pipa Distribusi - Jaringan Gas Kota (City Gas), Bogor, 1 Maret 2019



★ Pengawasan bersama dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Bareskrim POLRI, dan BIN - 15 Maret 2019





★ | Audiensi bersama dengan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Dr. Ir. Pramono Anung - 20 Maret 2019



★ | Achievement Motivation Training (AMT) kepada seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan BPH Migas, bertempat di Aula Gedung BPH Migas, Jumat 29 Maret 2019.



Penyerahan Sumur Bor Air Bersih di Desa Kalirejo, Kec Kalirejo Kab Lampung Tengah

10 Januari 2019 bertempat di Desa Kalirejo, Kec Kalirejo Kab. Lampung Tengah Komite BPH migas Bp Jugi Prajogio bersama Bupati Lamteng yg diwakili Staff Ahli Zulkifli, Asda Lampung Utara Bp Syahrizal SH MH, Kepala dinas Lampung Bp Budi Santosa, Camat Kalirejo Bp M Shaleh PS, DPRD Lamteng Bp Gofur, serta Jajaran Polres dan Kodim menyerahkan sumur bor air bersih sebanyak 3 Unit bantuan dari Badan Geologi.



Jargas Beroperasi di Penajam Paser Utara, Balikpapan - 27 maret 2019

Selain Kota Balikpapan, di hari yang sama, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga secara resmi telah merasakan manfaat jargas. Bertempat di Kelurahan Nenang, Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio didampingi oleh Bupati PPU Abdul Gafur Masud meresmikan jaringan gas kota sebanyak 4.260 SR. Jargas di Kabupaten PPU merupakan yang pertama kali dibangun oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM dengan APBN Tahun Anggaran 2018. Jargas Kabupaten PPU ini tersebar di Kelurahan Nenang, Penajam, Nipah-Nipah, Gunung Seteleng dan Sungai Parit.





Peresmian Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga ke 122 di SPBU KOMPAK 86.978.13 Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur - 26 Februari 2019

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Bpk. Bambang Gatot Ariyono, didampingi Bpk. Tjatur Sapto Edy, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Sekretaris BPH Migas, Bpk. Mohammad Hidayat, dan Manager Supply and Distribution MOR VIII PT Pertamina (Persero), Bpk. Salahuddin meresmikan Program BBM Satu Harga ke 122 di SPBU KOMPAK 86.978.13 Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.



Kementerian ESDM menyerahkan 200 titik lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada Masyarakat di Labuhan Batu Selatan, Sabtu 23 Maret 2019

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Komite BPH, Sumihar Panjaitan bersama Ketua Komisi VII DPR RI, H Gus Irawan Pasaribu. Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara menerima 600 titik PJU-TS. Sebarannya yakni, Kab. Labuhan Batu Selatan 200, Kab. Labuhan Batu 100, Kab. Tapanuli Tengah 100, Kab. Batubara 25 dan Kab. Padang Sidempuan 175 titik.



Perkuat Sinergi, Tindak Tegas Penyelewengan BBM Bersubsidi

Aksi penyelewengan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih ditemui di sejumlah wilayah. Sinergi lintas sektoral diperlukan guna mengoptimalkan pengawasan dan penindakan terhadap terduga pelaku aksi ilegal tersebut.



Image : detik.com

Berbagai modus

Terduga pelaku penyelewengan BBM bersubsidi melakukan aksinya dalam berbagai modus. Salah satunya seperti yang ditemui di Bangka. Baru-baru ini, jajaran Polres Bangka Barat, Bangka Belitung (Babel) berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal jenis Solar di pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok. Dari hasil penindakan itu, sedikitnya ada 80 ton BBM jenis Solar diamankan polisi.

Terungkapnya penyelundupan Solar ilegal berawal dari informasi masyarakat, menyebutkan ada dugaan penyelundupan BBM di pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok Kabupaten Bangka Barat, Pulau Bangka yang dibawa

menggunakan mobil truk dari Sumatera Selatan (Sumsel).

"BBM tersebut dibawa dari Sumsel ke Babel lewat Tanjung Kalian. Ada sepuluh orang yang diamankan pada saat penggerebekan di pelabuhan," jelas Kapolres Bangka Barat AKBP Firman Andreanto, Senin (18/3).

Dari hasil pemeriksaan petugas, masing-masing mobil truk bermuatan satu unit tangki berisikan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 10 ton ilegal.

"Kurang lebih ada 80 ton BBM jenis Solar yang diamankan petugas, kini para pelaku masih dalam proses penyelidikan dan belum bisa dirilis," ujar Firman.

Beralih ke Perairan Batam, Kepulauan Riau, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengamankan dua kapal yang diduga melakukan transfer BBM jenis High Speed Diesel (HSD) secara ilegal di perairan tersebut.

Kejadian itu bermula saat tim patroli pulang dari Pulau Nipa dan Karimun, Minggu (17/2) pukul 03.00 WIB. Petugas yang tergabung dalam Tim Satgas Operasi Keamanan Laut Bakamla dengan unsur Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB-13) kemudian mencurigai sebuah kapal kayu dengan muatan penuh tanpa lampu navigasi.

Petugas lalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas Bakamla mendapati kapal tanpa nama diawaki oleh anak di bawah umur dan tidak dilengkapi dokumen sedang mengangkut BBM sekitar 20 liter. Kapal diduga selesai melakukan transfer BBM jenis HSD secara ilegal di Dermaga Makobar, Batam.

Petugas menduga kapal kayu tanpa nama itu menampung BBM ilegal dari kapal tanker MP. Petugas juga mendapati seperangkat peralatan transfer BBM berupa pompa bensin dan selang BBM.

"Selanjutnya, kedua kapal beserta seluruh barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut," kata Kasubbag Humas Bakamla RI Letkol Bakamla Mardiono, dalam keterangannya, Senin (18/2).

Secara terpisah, Direktur Operasi Laut Laksamana Pertama Bakamla Nur Syawal Embun menegaskan operasi yang dilakukan di perairan Batam ini merupakan upaya Bakamla dalam menyuksekan program pemerintah dalam memberantas mafia dan penyalahgunaan BBM di laut.

Lain halnya dengan dugaan aksi penyelewengan BBM bersubsidi di Pontianak, Kalimantan Barat. Belum lama ini, polisi menangkap sopir truk yang kedapatan menggunakan tangki 'siluman' atau tangki tambahan untuk menampung BBM bersubsidi jenis Solar yang kemudian untuk dijual kembali

"Modus tersangka ialah menambah kapasitas tangki BBM truknya, kemudian ikut antri membeli BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU di wilayah Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya," kata Kasatreskrim Polresta Pontianak Kompol Muhammad Husni, Kamis (17/1).

Setelah selesai antri Solar di SPBU Sungai Ambawang, Solar tersebut dibawa ke daerah Rasau Jaya. Kemudian, disedot dari tangki tersebut dan dimasukkan ke jerigen untuk dikumpulkan. Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, baru dijual kembali.

Amankan Rp72 miliar

BPH Migas, yang fungsinya antara lain mengawasi pendistribusian BBM, terus berkomitmen menjalankan pengawasan terhadap aksi ilegal terkait distribusi BBM bersubsidi. Terbatasnya jumlah personel serta luasnya wilayah Indonesia mendorong BPH Migas untuk menjalin sinergitas dengan berbagai *stakeholder* dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.

Hal ini terlihat pada Jumat (15/3). Saat itu, BPH Migas melaksanakan pengawasan bersama dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Bareskrim Polri, dan BIN terkait dengan laporan masyarakat akan adanya pendistribusian BBM yang tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Tim BPH Migas yang dipimpin oleh Direktur BBM langsung menuju lokasi aduan masyarakat tersebut untuk mengecek dan melihat kondisi riil yang terjadi yang bertempat di sekitaran Kawasan Industri Manis Tangerang. Adapun hasil pengawasan bersama kali ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dilakukan pengawasan belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tim Pengawasan BPH Migas menyimpulkan bahwa perusahaan terkait tidak boleh beroperasi sampai dengan izin yang berlaku telah ditetapkan/diterbitkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Pengawasan bersama ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait aturan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan/Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan di bidang hilir migas sekaligus dalam rangka pengawasan BPH Migas sebagai Badan Pengawas (*Supervisory Body*) untuk menjaga dan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh NKRI.

Secara akumulasi, sepanjang tahun 2018, BPH Migas berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp72 miliar, setelah deteksi puluhan Badan Usaha yang tidak

melakukan verifikasi maupun iuran Badan Usaha.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan, data terakhir yang dimiliki BPH Migas pada 2018, setidaknya terdapat 41 Badan Usaha yang memiliki izin Badan Usaha, namun tidak pernah hadir saat proses verifikasi maupun rekonsiliasi izin niaga perusahaan.

Sementara itu, hingga tahun tersebut, sebanyak 25 Badan Usaha tidak melakukan pembayaran iuran maupun tidak menghadiri proses verifikasi setelah mendapat izin niaga. Adapun 25 Badan Usaha tersebut di antaranya, PT Anayaka Persada, PT Bangun Mitra Sejahtera maupun PT Berau Bunker Internasional.

"Dalam rangka peroleh peningkatan iuran, BPH Migas telah melakukan pengawasan, termasuk kerja sama dengan Kepolisian dan TNI. Berdasarkan verifikasi, 41 Badan Usaha tidak pernah hadir pada acara verifikasi dan rekonsiliasi iuran," katanya saat Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).

Berdasarkan temuan itu, dia mengatakan, setidaknya BPH Migas telah mampu melakukan penyelamatan 6,3 juta liter bahan bakar minyak dari Badan Usaha-Badan Usaha yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat itu berdasarkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.

"Maka lebih kurang ada enam juta liter BBM subsidi yang bisa kami amankan senilai Rp72 miliar. Walau ada 168 Badan Usaha, potensi penyimpangan BBM bersubsidi yang digunakan oknum itu banyak, yang belum kami optimalkan. Maka, ada 40-an Badan Usaha yang kami panggil verifikasi tidak pernah datang, ada 20-an Badan Usaha yang tidak bayar iuran," jelasnya.

Untuk itu, sesuai usulan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Fanshurullah mengatakan, 41 Badan Usaha maupun 25 Badan Usaha yang tidak mengikuti proses verifikasi triwulanan tersebut maupun melakukan iuran, akan dilakukan pencabutan izin usahanya.

"Pak menteri sudah tegaskan, agar Badan Usaha yang tidak menghadiri verifikasi, agar diusulkan dicabut izin niaga dan Badan Usahanya," jelas dia. ★

Selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga berperan melakukan penarikan iuran badan usaha.

Oleh karena itu, setiap triwulan BPH Migas melakukan verifikasi atas pembayaran iuran kepada badan usaha. Lalu, setiap iuran yang dibayarkan berguna bagi negara karena masuk dalam PNPB.

Tindak Tegas Badan Usaha yang Lalai Bayar Iuran



Pada tahun 2018, BPH Migas mencatat realisasi penerimaan iuran sebesar Rp 1,34 triliun tumbuh 16,9% dari tahun sebelumnya atau mencapai 142% dari yang ditargetkan. Jumlah tersebut terdiri atas iuran bahan bakar minyak (bbm) Rp 1,07 triliun dan Rp 279 miliar iuran gas bumi.

Pada 2019, iuran BPH Migas ditargetkan sebesar Rp 950 miliar, angka tersebut terdiri atas target iuran BBM Rp 678 miliar dan iuran gas bumi Rp 85 miliar. Sementara realisasi hingga 15 Maret 2019 telah mencapai Rp 412 miliar atau 43% dari target.

Terancam pencabutan usaha

Meski iuran BPH Migas tahun 2018 mengalami kenaikan, BPH Migas berencana

melaporkan 48 badan usaha hilir migas yang tidak hadir dalam verifikasi rutin dan tidak membayar iuran. Mereka bakal dicabut izin usahanya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan sudah merekomendasikan agar 48 badan usaha itu dicabut izin niaga. Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah sepakat.

"BPH Migas akan mengusulkan merekomendasi pencabutan. Pak Menteri sudah sepakat," ujar Fanshurullah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Empat puluh delapan badan usaha hilir migas itu terdiri dari 23 badan usaha yang tidak hadir dalam verifikasi, 18 badan usaha tidak membayar iuran, dan tujuh badan usaha tidak hadir verifikasi dan juga tidak membayar iuran.

"Kalau mereka tidak jualan. lalu BBM Subsidi penyalahgunaan. Verifikasi tidak datang dan iuran tidak bayar, sudah cabut saja," tegas Fanshurullah.

Berikut nama-nama badan usaha yang berpotensi dicabut izin usahanya:

1. PT. Alwaled Jaya Perkasa
2. PT. Anayaka Persada
3. PT. Berau Bunker International
4. PT Dwikarya Niaga Agung
5. PT. Endo Budiarto Beserta
6. PT. Energi Nusantara Prima
7. PT. GasEmas
8. PT. Gelora Lintas Samudra
9. PT. Hj Nurfadhiah Jaya Angkasa
10. PT. Inti Lingga Sejahtera
11. PT. Intim Perkasa
12. PT. Intim Putera Perkasa
13. PT. Khatulistiwa Raya Energy
14. PT. Lautan Luas Tbk
15. PT Masinton Abadi Sentosa
16. PT. Tawu Inti Bati

17. PT. Mitra Patra Borneo
18. PT. Oil Tanking Merak
19. PT. Patra Buana Putra
20. PT. Petro Artha Niaga
21. PT. Petro Gasindo Intiniaga
22. PT. Petrobas
23. PT. Pumas Petro Lampung
24. PT. Putra Naga Sagara
25. PT. Roulina Energi
26. PT. Sae Petroleum Indonesia
27. PT. Sembilan Muara Abadi Petroleum Gas
28. PT. Senjo Energi Indonesia
29. PT. Suma Adi Jaya
30. PT. Teknologi Energi Terpadu
31. PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama
32. PT. Hude Trindo Niaga Bahari
33. PT. Vian Rama Pratama
34. PT. Petro Bakti Persada
35. PT. Patra SK 36 PT. Berkat Restu Guru
37. PT. Beringin Petroleum Energy
38. PT. Metro Abadi Raya
39. PT. Laguna Industri Nusantara
40. PT. Tri Putri Atari
41. PT. Cipta Sarana
42. PT. Bangun Mitra Sejahtera
43. PT. Emar Elang Perkasa
44. PT. Fajar Bintang Mandiri
45. PT. Gemilang Trymo Mulyatama
46. PT. Hude Trindo Niaga Bahari
47. PT. Nusantara Daya Energi
48. PT. Puniar Mitra Abadi

Di tempat terpisah, Fanshurullah mengatakan, setidaknya BPH Migas telah mampu melakukan penyelamatan 6,3 juta liter bahan bakar minyak dari badan usaha-

badan usaha yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat itu berdasarkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.

“Maka, lebih kurang ada enam juta liter BBM subsidi yang bisa kami amankan senilai Rp72 miliar. Walau ada 168 badan usaha, potensi penyimpangan BBM subsidi yang digunakan oknum itu banyak, yang belum kami optimalkan. Maka, ada 40-an badan usaha yang kami panggil verifikasi tidak pernah datang ada 20-an badan usaha yang tidak bayar iuran,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Komisi VII DPR RI juga menyikapi persoalan itu.

“Kami harap dapat diberikan kajian yang komprehensif. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan tentang progres izin-izin pipa transmisi gas bumi dan wilayah usaha gas bumi serta realisasi pekerjaannya sampai dengan tahun 2019, mengingat upaya untuk meningkatkan gas bumi di dalam negeri perlu ditingkatkan. Karena produksi gas bumi di dalam negeri terus meningkat dan ditemukannya beberapa ladang gas besar di wilayah Indonesia. Badan usaha mana saja yang sudah menjalankan atau mengerjakannya dengan baik dan mana yang masih bermasalah,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam.

AKR belum dapat izin jual Avtur

Masih terkait izin, PT AKR Corporindo Tbk, Fanshurullah mengatakan, saat ini baru

mengantongi izin sebagai penyalur bahan bakar sementara dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun agar bisa menjual Avtur, AKR harus mengantongi izin niaga umum tetap yang diterbitkan Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Baru kemudian dievaluasi BPH Migas.

“Tidak ada, belum ada izin dari BPH Migas. Izin niaga sementara dikeluarkan BKPM itu pada Oktober,” kata Fanshurullah di kesempatan berbeda.

Lebih lanjut Fashurullah menuturkan, karena izin yang dikantongi belum sesuai, maka AKR tidak bisa menjual Avtur dan belum menjual di seluruh bandara yang ada Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya mengatakan jika tidak ada halangan, penjualan avtur oleh AKR bisa dilakukan pada April 2019.

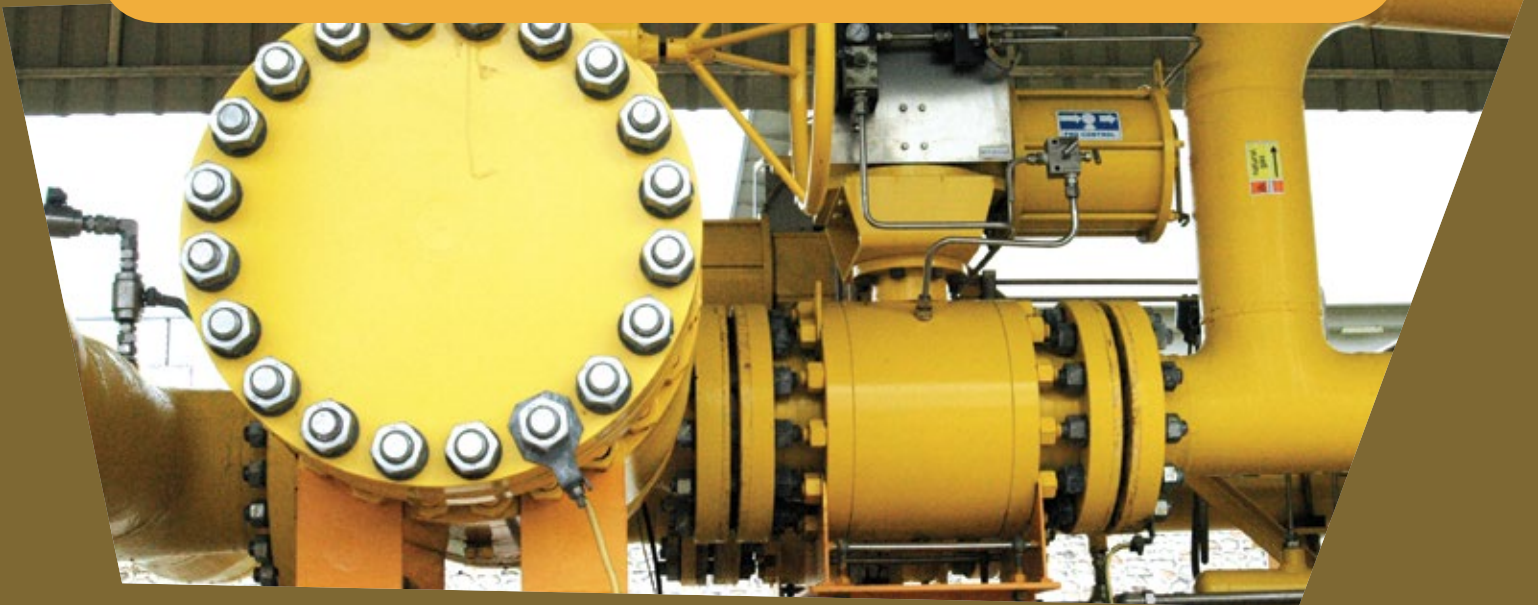
“Ya kami maunya begitu (1 April 2019). Kalau mereka minta tanggal berapa, saya bilang kenapa mesti tunggu lama-lama,” kata Luhut.

AKR tidak akan sendiri dalam memulai bisnis avtur. AKR membentuk perusahaan patungan (*joint venture*) dengan perusahaan migas asal Inggris, BP. Kedua perusahaan saat ini telah mendirikan perusahaan baru yang menjual BBM di beberapa wilayah di sekitar Jabodetabek. ★



Mendorong *Stakeholder* Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan koperasi juga bisa turut berkontribusi dalam peningkatan pemanfaatan gas bumi. Pasalnya, selama ini persoalan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi.



Peran serta swasta atau koperasi, misalnya, dapat diimplementasikan pada pembangunan jaringan gas kota atau lebih dikenal luas sebagai jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas). Terkait hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil bukan hanya dilaksanakan oleh BUMN Migas melalui penugasan Pemerintah, tapi dapat juga lewat BUMD, swasta, dan koperasi. Beleid itu diharapkan dapat menstimulasi pengembangan jaringan gas melalui penetrasi pasar rumah tangga 2 dan pelanggan kecil 2, namun tetap mengutamakan kebutuhan rumah tangga..

Peningkatan pemanfaatan gas bumi dapat memberikan beragam manfaat, contohnya mengurangi impor elpiji. Apalagi, selama ini impor elpiji membebani negara.

Berdasarkan data BPH Migas, Indonesia mengimpor 5 juta ton elpiji pada 2018.

Memberikan stimulus

Jugi Prajogio menambahkan, dalam peraturan BPH Migas yang terdahulu sudah ada yang mengatur tentang harga jargas untuk rumah tangga tingkat dua, dengan harga per meter kubik gas bumi paling tinggi sebesar dua kali lipat dari harga yang dikenakan di rumah tangga tingkat satu.

"Kalau dihitung, Rp8.500 per m³, menurut badan usaha tidak menarik karena jauh dari keekonomian. Nah kami buat simulasi, kalau Rp10.000 masuk harga wajar bagi mereka," katanya, Selasa (5/3/2019).

Hanya saja, Jugi memastikan harga sekitar Rp10.000 per m³ hanya ditetapkan di rumah tangga tingkat dua, sementara rumah tangga tingkat satu tetap senilai Rp4.250 per m³. Harga sekitar Rp10.000 per m³ masih dianggap lebih terjangkau

dengan harga LPG tabung 12 kg yang dipasaran per setara Rp11.000 kilogram.

Menurutnya, banyak badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan gas bumi tertarik dengan harga jual yang dirumuskan BPH Migas. Sayangnya, Jugi enggan menyebut badan usaha mana saja yang sudah menunjukkan ketertarikannya.

"Nantinya kami mencabut pasal tersebut, dan diganti dengan pasal baru. Tidak perlu peraturan baru, hanya sebatas addendum saja," katanya.

Dia menambahkan sejauh ini penggunaan gas bumi yang dialirkan dengan jargas menghemat konsumsi LPG sebanyak 2.831 ton per bulan atau setara penghematan impor senilai Rp18,08 miliar per bulan. Dalam hitungan BPH Migas, setiap rumah tangga memanfaatkan gas bumi melalui jargas sebesar 14 – 16 m³ per bulan, meski penggunaan maksimal dapat dilakukan hingga 50 m³.

"Kalau ada yang rajin masak, atau membuka warung makan kecil bisa mencapai 20 – 30 m3 per bulan," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala BPH Migas fanshurullah Asa mengatakan dengan adanya kebijakan di atas, bisa menarik pihak swasta untuk turut membangun jaringan gas. Di sisi lain, kebijakan untuk optimalisasi jaringan gas juga bias menekan impor LPG. Dengan demikian, anggaran impor LPG bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas sehingga jargas rumah tangga bisa lebih murah, aman dan lebih gampang untuk masyarakat.

"Sangat mendukung kebijakan untuk optimalisasi jargas, daripada uangnya untuk impor LPG lebih baik digunakan untuk membangun jaringan gas agar bisa lebih murah, aman dan lebih gampang untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan jaringan gas, dirinya mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) mengingat jika pembangunan jargas hanya mengandalkan APBN, maka hal itu bisa memberatkan keuangan negara.

Selain itu, imbuhnya, Pemerintah juga bisa menawarkan kepada BUMN dan badan usaha swasta yang ingin berinvestasi dengan kompensasi harga jaringan gas cukup kompetitif dengan harga LPG non subsidi 12 kg.

"Untuk skema opsi tanpa APBN juga bisa pakai skema KPBU seperti infrastruktur lain yang sudah dijalan atau untuk cluster rumah tangga (RT) 2 yang masyarakat menengah keatas. Bisa juga ditawarkan ke BUMN atau BU swasta yang mau investasi, nanti harga jargasnya kompetitif dengan harga LPG 12 kg. Sesuai UU Migas pasal 46 poin 2 e, harga gas untuk jargas ditetapkan oleh BPH Migas," lanjutnya.

Tak hanya itu, Pemerintah ternyata juga menetapkan harga gas di hulu untuk jargas sebesar USD4,72 per mmbtu. Namun harga gas khusus ini hanya untuk jargas rumah tangga dan pelanggan kecil. Namun untuk jargas pelanggan komersil, maka harga insentif gas di hulu tidak berlaku.

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan penggratisan *toll fee* untuk fasilitas bersama yang digunakan untuk jargas seperti fasilitas pengangkutan dan fasilitas penyimpanan. Adapun pemanfaatan fasilitas bersama

tidak merugikan karena gas yang dialirkan untuk mendukung percepatan jargas rumah tangga sangat kecil.

Baik bagi masyarakat

Hingga akhir 2018, BPH Migas mencatat telah ada 325.773 sambungan rumah tangga yang tersebar di 45 wilayah kabupaten atau kota se-Indonesia. Adapun berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Pemerintah menargetkan 4,7 juta SR pada tahun 2025.

Selain itu, BPH Migas melalui sidang komite pada 25 Februari 2019 menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi untuk tujuh kabupaten dan kota.

"Harga ini diyakini baik bagi masyarakat," ujar Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio.

Adapun tujuh kabupaten atau kota yang dimaksud antara lain Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan; Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh; serta Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah sambungan rumah tangga di tujuh wilayah tersebut adalah sebanyak 55.360 sambungan. Dengan adanya penetapan itu, total ada 52 wilayah yang sudah dialiri jaringan gas kota.

Harga jual gas bumi melalui pipa yang ditetapkan BPH Migas, antara lain maksimum Rp 4.250 per meter kubik untuk kategori Rumah Tangga 1 dan pelanggan Kecil 1, serta Rp 6.250 per meter kubik untuk Rumah Tangga 2 dan Pelanggan Kecil 2.

Jugi menjelaskan pengguna yang termasuk ke dalam RT-1 adalah rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana,



dan sejenisnya. Sementara RT-2 meliputi rumah menengah ke atas, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya. Adapun pengguna yang masuk ke dalam kategori PK-1 antara lain rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah hingga kantor sosial. Sementara PK-2 misalnya hotel, restoran, rumah sakit, swasta, perkantoran swasta, hingga mal.

Dalam menetapkan harga, BPH Migas menjadikan harga jual elpiji 3 kilogram dan elpiji 12 kilogram sebagai referensi. Sehingga diharapkan tidak mengganggu harga beli di pasar.

Ia menyebut harga jual gas untuk RT-1 dan PK-1 itu pasti lebih murah ketimbang harga elpiji 3 kilogram yang berkisar Rp 5.013 hingga Rp 6.266 per meter kubik. Begitu pula harga gas RT-2 dan PK-2 yang bakal lebih murah dari elpiji 12 kilogram yang berkisar Rp 9.085 hingga Rp 11.278 per meter kubik.

"Penetapan harga ini mudah-mudahan bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan jaringan gas kota dan ke depannya bisa secara nyata mengurangi impor LPG," kata Jugi.

Di samping jargas, peran serta swasta atau koperasi juga sangat mungkin diterapkan pada infrastruktur gas bumi lainnya, seperti pembangunan jaringan pipa transmisi gas Trans Kalimantan. ★



BPH Migas menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa di tujuh kabupaten dan kota. Penetapan harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan daya beli masyarakat, usaha kecil dan kesinambungan badan usaha niaga gas bumi.

Penetapan Harga Jual Gas pada Jaringan Gas Wujudkan Rasa Keadilan

Hasil sidang

Melalui sidang Komite yang dipimpin Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Senin (25/02/2019), BPH Migas menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi untuk tujuh kabupaten/kota, yaitu:

1. Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kabupaten Musi Rawas
3. Kabupaten Deli Serdang
4. Kabupaten Serang
5. Kabupaten Aceh Utara
6. Kota Lhokseumawe
7. Kota Medan

Berikut hasil sidang tersebut:

- a. Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi untuk Rumah

Tangga-1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp4.250/M3 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik) dan untuk Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp6.250/M3 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik);

- b. Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi untuk Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp4.250/M3 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik) dan untuk Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp6.250/M3 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik);
- c. Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sampai dengan huruf b ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas

Bumi, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan satu harga jual gas untuk 7 Kabupaten/Kota pada jaringan gas untuk RT-1 dan PK-1 sebesar Rp4.250/M3 ini lebih murah dari pada harga pasar Gas LPG 3 Kg yg berkisar antara Rp5.013,- s.d Rp6.266,-/M3. Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 sebesar Rp6.250,- lebih murah dari pada harga pasar Gas LPG 12 Kg yang berkisar antara Rp9.085,- s.d Rp11.278,-.

Melalui berbagai tahap

Penetapan harga jual gas berdasarkan rapat komite, survei daya beli masyarakat, *public hearing*, dan sidang Komite BPH Migas. Sebelum dilakukan penetapan harga jual ini, BPH Migas telah melakukan berbagai tahapan, yaitu:

- a. Menerima dan melakukan verifikasi data usulan harga jual gas dari badan usaha
- b. Presentasi badan usaha
- c. Verifikasi dokumen
- d. Survei daya beli masyarakat
- e. Evaluasi hasil survei daya beli masyarakat
- f. Evaluasi perhitungan usulan harga
- g. Rapat Komite
- h. *Public hearing*
- i. Sidang Komite untuk penetapan harga

Seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/ atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah tangga dan Pelanggan Kecil, BPH Migas mendorong BUMN Migas, BUMD, Swasta, dan Koperasi untuk turut serta dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas dengan mengikuti lelang wilayah Distribusi/Niaga yang akan dilaksanakan oleh BPH Migas.

Sebagai upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri agar dapat dinikmati oleh rakyat langsung terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan usaha kecil; BPH Migas melalui peran tugas dan fungsinya, yaitu penetapan harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil turut serta bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau dan wajar.

Mempertimbangkan berbagai kepentingan

Dalam menetapkan harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil,

BPH Migas wajib mempertimbangkan kemampuan/daya beli riil masyarakat setempat atas kebutuhan energi disamping juga memperhatikan tingkat keekonomian Badan Usaha operator jaringan gas agar tetap sustainable.

Untuk memenuhinya, salah satunya BPH Migas melaksanakan kegiatan survei pengumpulan data/informasi lapangan atas daya beli dan konsumsi masyarakat langsung sebagai pelanggan jaringan gas dan distributor LPG (tingkat pangkalan dan pengecer) atas harga pasar untuk komoditi LPG 3 kg; 5,5 kg; dan 12 kg di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, termasuk melakukan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah setempat pada tanggal 8-11 Januari 2019. Dari hasil kegiatan ini didapatkan data/informasi yang komprehensif dan mencerminkan kondisi nyata masyarakat dalam rangka sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan BPH Migas dalam menetapkan harga jual energi gas yang berkeadilan bagi rakyat.

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, sebelum adanya penetapan harga gas ini, banderol gas di berbagai daerah tidak merata. Ada yang menjual di bawah Rp4.000 hingga di atas Rp4.000 per meter kubik.

Hal ini menurutnya justru membuat badan usaha yang membangun infrastruktur jargas merugi. Oleh karenanya, BPH Migas selaku regulator perlu mengatur hal ini sesuai dengan Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004.

"Kita coba (atur) harga ini agar badan usaha tidak bleeding, dulu kan bleeding terus. Contoh PGN nih, tidak mau dia, ogah-ogahan. Jadi kita menghindari badan usaha rugi," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Selain itu, pertimbangan utama dalam menghitung harga gas ini adalah tidak melebihi harga gas elpiji per kilogram. Dengan demikian, harga yang saat ini ditetapkan sudah pas karena tidak memberatkan badan usaha maupun masyarakat.

Dia melanjutkan, jika harga gas menyamai bahkan lebih mahal dari elpiji maka pihaknya kesulitan melakukan konversi. Padahal, penggunaan jargas ini dicanangkan pemerintah agar bisa mengurangi impor elpiji yang membengkak.

"Kita yakinkan juga Pemda bahwa jargas ini baik untuk masyarakat, yang penting kan harganya tidak melebihi elpiji. Begitu kita bilang gitu, daya beli masyarakat tidak ganggu," ucapnya.

BPH Migas juga telah melakukan sosialisasi kepada Pemda mengenai penyesuaian harga ini. Begitu pun dengan kelebihan penggunaan jargas yang lebih ramah lingkungan dan hemat ketimbang elpiji untuk masyarakat.

"Kita kan ada *public hearing* dengan Pemda. Kita jelaskan juga ke Pemda bahwa gas bumi penting untuk masyarakat. Kalau Pemda, masyarakat sih maunya tidak naik. Tapi ini kenaikannya bertahap kok," tuturnya. ★





BPH Migas Gelar Serangkaian **Sosialisasi Sub Penyalur**

BPH Migas menyelenggarakan sosialisasi implementasi sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah secara berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan guna mempercepat penerapan program BBM Satu Harga secara nasional.

Sub penyalur adalah adalah satu titik untuk membantu ketersediaan BBM dengan syarat tertentu di mana sub penyalur tersebut akan mengambil BBM dari SPBU dengan jarak 5 sampai 10 meter. Kemudian, diangkut ke titik tertentu untuk dijual ke pengguna tertentu.

Labuhan Batu Selatan, 1 Februari 2019



BPH Migas menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur BBM kepada masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bertempat di Hotel Grand Suma, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Acara sosialisasi sub penyalur ini dilaksanakan di hadapan peserta yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan sekitarnya. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasar Ribu, Komite BPH Migas Jugi Prajogio, Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Kholil Jufri Harahap, dan Manager Industrial Fuel Marketing Pertamina (Persero) MOR I Sunardi.

Labuhan Batu Selatan masih memiliki dua kecamatan yang belum mendapatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu

Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Kampung Rakyat yang letaknya cukup jauh dari Kota Labuhan Batu. Jauhnya SPBU, menimbulkan menjamurnya penjual eceran.

Bireun, 2 Februari 2019



BPH Migas menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur BBM kepada masyarakat di Kabupaten Bireun, Aceh, bertempat di Gedung Aula Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI H. Firmandez, Komite BPH Migas M. Lobo Balia, Kasubdit Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan, Asisten 3 Bidang Adiministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Dailani ST, Biro Hukum Kementerian ESDM Muhidin, dan Kacab PT Pertamina (Persero) Cabang Banda Aceh Awan Raharjo.

Dalam sambutannya, M. Lobo Balia menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 Ayat (2), disebutkan bahwa "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI". Dalam pelaksanaannya, hal ini diamanahkan kepada BPH Migas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam upaya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI.

BPH Migas berharap banyak masyarakat yang mengajukan diri sebagai sub penyalur, termasuk di Kabupaten Bireuen, Aceh. Karena, selain mempercepat implementasi BBM satu harga, sub penyalur juga berperan menyalurkan BBM ke daerah yang belum terjangkau.

Harapan BPH Migas, dengan makin banyaknya sub penyalur, harga BBM dapat

dikendalikan. Kalau di penyalur wajib satu harga, kalau di tingkat sub penyalur, harga BBM satu harga ditambah ongkos angkut. Artinya, harganya dikendalikan oleh pemda.

Pontianak, 7 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan sosialisasi implementasi sub penyalur kepada masyarakat pengguna di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Acara dibuka oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Hadir dalam acara ini:

1. Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat M. Ridwan
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Haryadi Tri Wibowo
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Setda Kabupaten Kubu Raya Norasari Arani
5. Biro Hukum Kementerian ESDM yang diwakili oleh Muhidin
6. Kasie Pengaturan Pendistribusian BBM BPH Migas Litawati
7. Inspektorat Jenderal Kementerian yang diwakili oleh Syahroni
8. Branch Manager Marketing Kalbarteng PT Pertamina (Persero) MOR VI M. Ivan Syuhada
9. PT AKR Corporindo Tbk Cabang Pontianak yang diwakili oleh Agustinus Ervin
10. PT Garuda Mas Energi yang diwakili oleh Hery Aminuddin

Dengan adanya acara sosialisasi ini, diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan dan pendistribusian BBM yang merata melalui sinergi pembangunan sub penyalur dan penyalur mini.

Musi Banyuasin, 1 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan acara sosialisasi implementasi sub penyalur kepada masyarakat pengguna di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Acara dibuka oleh Komite BPH Migas, Bpk. Ahmad Rizal dan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPR RI Ir. H. Nazarudin Kiemas, M.M
2. Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Beni Hernedi
3. Komite BPH Migas Ahmad Rizal
4. Kepala Dinas ESDM Prov. Sumsel, diwakili oleh Ariansyah, M.T
5. PT Pertamina (Persero) MOR II yang diwakili oleh Sindu

Medan, 15 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan sosialisasi implementasi sub penyalur di Hotel Gran Aston Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Hari Pratoyo. Gubernur Provinsi Sumut memberikan sambutan yang diwakili oleh Kabis Energi Dinas ESDM Neftiana Sitepu. Para narasumber yang mengisi kegiatan ini adalah:

1. Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring
2. Komite BPH Migas Henry Ahmad
3. Walikota Kota Medan, yang diwakili oleh Kadis Perdagangan Kota Medan Dammikrot

4. Biro Hukum Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Muhidin
5. PT Pertamina (Persero), RFM Manager MOR I Rama Suhut Sinaga
6. PT AKR Corporindo Cabang Medan Retail Business Development Riadi

Tebing Tinggi, 14 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan acara sosialisasi implementasi sub penyalur kepada masyarakat pengguna di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri narasumber sebagai berikut:

1. Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahab Dalimunte
2. Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan
3. Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara Zubaidi
4. Walikota Tebing Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Tebing Tinggi Kamlan Mursid
5. Kasie Pengaturan Ketersediaan BBM BPH Migas Iswadi
6. Retail Fuel Marketing Manager PT Pertamina (Persero) MOR I Rama Suhut Sinaga
7. Retail Operation PT AKR Corporindo Tbk Cabang Sumatera Utara Riadi

Saat ini, total Penyalur yang terdapat di Kota Tebing Tinggi berjumlah 8 Penyalur. Dengan adanya acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur tersebut, diharapkan dapat membantu rantai distribusi BBM pada masyarakat yang jauh dari penyalur.

Minahasa, 15 Februari 2019

BPH Migas menyelenggarakan acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur BBM di Hotel Mercure Minahasa, Sulawesi



Utara. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, sebagai berikut:

1. Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan
2. Komite BPH Migas M. Lobo Balia
3. Ditjen Migas Kementerian ESDM yang diwakili oleh M. Ilham Syah
4. Biro Hukum Kementerian ESDM yang diwakili oleh Muhidin
5. Kabag Perekonomian & SDA Pemda Minahasa Anneke G. Maindoka
5. PT Pertamina (Persero) MOR VII yang diwakili oleh Imam Rizki

Riau, 7 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur BBM di Hotel Premier Pekanbaru, Provinsi Riau. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Henry Achmad, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber sebagai berikut:

1. Anggota Komisi VII DPR Sayed Abubakar A Asseggaf
2. Komite BPH Migas Henry Achmad
3. Ditjen Migas Kementerian ESDM Riau Kiswandini
4. Kepala Dinas Perindustrian Pemprov Riau Asriza
5. PT Pertamina (Persero) MOR I yang diwakili oleh Ariwibawa.

Banjar, 7 Februari 2019

BPH Migas menggelar acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Jugi Prajogi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:



1. Anggota Komisi VII DPRI H. Dardiansyah
2. Komite BPH Migas Jugi Prajogio
3. PT Pertamina (Persero) MOR VI yang diwakili oleh Endo Eko Satrio
4. Asisten II Gubernur Kalimantan Selatan

Muara Enim, 2 Februari 2019



BPH Migas menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur BBM kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim, bertempat di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Acara sosialisasi Sub Penyalur ini dilaksanakan dihadapan 100 orang yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, Komite BPH Migas Ahmad Rizal, dan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Muara Enim.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Rizal mengatakan, Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang menggambarkan distribusi BBM belum merata di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih sering terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Adapun jumlah SPBU di Kabupaten Muara Enim terbilang sedikit. Dari 20 kecamatan, yang memiliki SPBU hanya tujuh Kecamatan.

Untuk itu, kata Ahmad Rizal, BPH Migas dalam hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pengusaha kecil untuk menjadi sub penyalur BBM secara legal. Hal ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. ★

Serangkaian Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja BPH Migas



BPH Migas menyelenggarakan serangkaian sosialisasi tugas, fungsi, dan capaian kinerja di sejumlah wilayah. Hal ini perlu guna menyebarluaskan ruang lingkup peran BPH Migas dan sekaligus mendorong potensi sinergi dengan berbagai *stakeholder*.

Dalam setiap sesinya, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Masyarakat berharap peran BPH Migas semakin nyata untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG 3 Kg, khususnya di wilayahnya masing-masing.

Batang, 1 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja di Bumdes Desa Selokerto, Kecamatan Pecalongan, Kabupaten Batang, Jawa

Tengah. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPRI Ramson Siagian
2. Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo
3. PT. Pertamina (Persero) MOR IV yang diwakili oleh Andar Lestari
4. Inspektorat Jendral Kementerian ESDM yang diwakili oleh Fuada Maisarua Pratiwi

Pekalongan, 8 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada Masyarakat di Kabupaten Pekalongan bertempat di Kantor PPNI Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPRI Ramson Siagian
2. Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo
3. PT Pertamina (Persero) MOR IV yang diwakili oleh Raka Pradipta

Dengan moderator Narcici Makalew, turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diwakili Dinas Kesbangpol.

Gunung Kidul, 23 Februari 2019

BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang diselenggarakan di Balai Desa



Banaran, Playen ini dibuka oleh Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan. Turut hadir juga sebagai narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPRI H. M. Gandung Pardiman
2. Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo
3. PT Pertamina (Persero) MOR IV yang diwakili oleh Andar Titi Lestari

Kabupaten Bogor, 17 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada Masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertempat di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo. Para narasumber yang mengisi acara kali ini adalah:

1. Anggota Komisi VII DPRI Adian Napitupulu
2. Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo
3. PT Pertamina (Persero) MOR III yang diwakili oleh Sahat Purba
4. Kepala Desa Babakan H. Pendi

Peserta yang hadir sangat antusias dan menyampaikan kondisi permasalahan terkait penyediaan BBM dan Gas LPG 3 Kg kepada narasumber. Masyarakat berharap BPH Migas dan Pertamina dapat meningkatkan pengawasan BBM, terutama BBM bersubsidi dan gas LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan tidak ada kelangkaan. Masyarakat juga berharap dapat turut serta menyalurkan BBM dan gas LPG 3 Kg melalui Bumdes agar penyaluran tepat sasaran dan meningkatkan roda perekonomian

yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Kulon Progo, 15 Maret 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, bertempat di Joglo Simbolong, Desa Jatimulyo, Kecamatan Giri Mulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPRI Agus Sulistyono
2. Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo
3. PT Pertamina (Persero) MOR IV yang diwakili oleh Johan Miftah
4. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang diwakili oleh Joko Santoso dan Dicky Muhammad

Peserta yang hadir sangat antusias dan menyampaikan kondisi permasalahan terkait penyediaan BBM dan gas LPG 3 Kg kepada narasumber dan berharap BPH Migas dapat meningkatkan pengawasan BBM, terutama BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Masyarakat juga berharap dengan dibangunnya Bandara NYIA di Temon, Kulon Progo, diharapkan dapat dibangun SPBU di wilayah Girimulyo. Hal ini untuk mendukung Jalur Menoreh yang merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menghubungkan Bandara NYIA dengan Candi Borobudur dan pengembangan wisata alam di kawasan perbukitan Menoreh.

Tasikmalaya, 12 Maret 2019

BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada



masyarakat di Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara ini bertempat di Hotel Santika Tasikmalaya. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Jugi Prajugio dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPRI Dony Maryadi Oekon
2. Komite BPH Migas Jugi Prajugio
3. PT Pertamina (Persero) MOR III yang diwakili oleh Triyasa
4. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang diwakili oleh JPH Bobby Silalahi

Lamongan, 13 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan acara Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada sekitar 200 masyarakat pengguna di Kabupaten Lamongan, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Lamongan, Jawa Timur.

Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Jugi Prajugio dan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, sebagai berikut:

1. Anggota Komisi VII DPRI Nasyirul Falah Amru
2. Komite BPH Migas Jugi Prajugio
3. PT Pertamina (Persero) MOR V Toni Pradana

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan ketersediaan dan distribusi BBM jenis Premium agar masyarakat mudah memperolehnya. Selain itu, masyarakat

Lamongan juga berharap pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga dapat segera terwujud guna menggantikan gas LPG 3 Kg.

Dramaga, Kabupaten Bogor, 9 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja di Hotel Duta Berlian, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar dengan narasumber:

1. Anggota Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh
2. Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar

3. PT Pertamina (Persero) MOR III yang diwakili oleh Rifki Nasution

Peserta yang hadir dari Masyarakat berjumlah 200 orang, Mereka sangat antusias dan menyampaikan kondisi permasalahan terkait penyediaan BBM ke Narasumber.

Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, 7 Februari 2019



BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja kepada masyarakat pengguna di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Komite

BPH Migas M. Ibnu Fajar membuka acara yang dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber:

1. Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar
2. Ivan Doly Gultom
3. PT Pertamina (Persero) MOR III yang diwakili oleh Fahrizal Imaduddin
4. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang diwakili oleh Djarot Pranggono Ontowiryo

Selama ini, masyarakat Pulau Kelapa selalu kesulitan memperoleh BBM karena harus jauh-jauh pergi ke Muara Angke, Tanjung Priok, atau Banten untuk membelinya. Maka dengan acara ini, masyarakat Pulau Kelapa, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, berharap agar dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah ke depannya. ★



Rapat Kerja Tahun Anggaran 2019



BPH Migas menyelenggarakan Rapat Kerja Tahun Anggaran 2019 yang bertempat di Hotel The 101 Malang pada tanggal 24-26 Januari 2019. Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing unit BPH Migas Tahun 2018 dan rencana pelaksanaan program kerja Tahun 2019 untuk melihat secara detail program apa yang akan dilaksanakan oleh BPH Migas selama tahun 2019.

Rapat Kerja secara resmi dibuka oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa pada hari Jumat (25/1). Rapat Kerja Tahun 2019 mengambil tema "Menuju Era Baru BPH Migas yang Profesional, Berintegritas, dan Melayani". Sehari sebelum acara rapat kerja dibuka secara resmi, telah dimulai pemaparan pencapaian kinerja 2018 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2019 oleh masing-masing Unit Eselon IV.

Setiap program kerja yang dipaparkan akan menjadi sebuah komitmen yang mengikat kepada masing-masing unit untuk terus semangat dan terus konsisten untuk dapat memberikan kinerja yang sesuai dengan target sasaran yang telah dibuat dengan planning yang tepat, actuating/pelaksanaan yang cermat, dan pengawasan yang ketat.

Pada akhir rapat kerja, dilakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan

rencana kerja dan target penyerapan anggaran sebesar 100% oleh masing-masing eselon IV dilingkungkan BPH Migas. Pada rapat kerja kali ini juga masing-masing eselon IV untuk menyampaikan dan menandatangani Key Performance Indicator (KPI) unggulan sebagai bentuk improvement untuk mewujudkan era baru BPH Migas yang profesional, berintegritas, dan melayani. ★



Team Building Games BPH Migas

Pada Sabtu (26/2), dilakukan Team Building Games yang diikuti oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Komite BPH Migas, pejabat struktural, dan seluruh pegawai yang ikut dalam Rapat Kerja BPH Migas 2019.

Bertempat di Ballroom Hotel The 101 Malang, acara Team Building diawali dengan senam pagi bersama. Setelah senam pagi, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok dan pemilihan ketua Team

Building. Kegiatan Team Building Games diisi dengan berbagai games untuk menumbuhkan kerjasama, kekompakan, dan keakraban antarpimpinan dan pegawai BPH Migas. ★



BPH Migas Mengadakan *Closing Meeting* Audit Internal Sistem Manajemen Integrasi

BPH Migas telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Integrasi, meliputi ISO 9001:2015 (Mutu), ISO 14001:2015 (Lingkungan), OHSAS 18001:2007 (Keselamatan) dari Badan Sertifikasi Internasional, yaitu Bureau Veritas pada tanggal 8 Mei 2018.



Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Integrasi BPH Migas, telah dilakukan Closing Meeting Audit Internal, Selasa (22/1), sebagai kelanjutan dari kegiatan audit internal yang sudah dilakukan pada tanggal 8-9 Januari 2019.

Closing meeting dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan dihadiri oleh Komite BPH Migas bidang Sekretariat dan bidang BBM, Sekretaris BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas dan Tim Auditor BPH Migas dilakukan dalam rangka penyampaian hasil audit internal kepada Pimpinan Puncak yaitu Pimpinan BPH Migas terkait implementasi Sistem Manajemen Integrasi di BPH Migas.

Diharapkan hasil audit internal ini dapat mendorong dan sebagai bukti nyata bahwa BPH Migas berkomitmen terus melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen sesuai dengan standar Internasional. ★

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bangka ke BPH Migas

Kunjungan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangka dalam rangka konsultasi mengenai pengaturan dan perizinan penjualan BBM oleh masyarakat. Dalam salah satu pemaparannya, Ketua Komisi III DPRD H. Hendra Yunus menyampaikan bahwa Bangka sebagai daerah pertambangan memerlukan BBM yang cukup banyak untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, juga BBM

yang ada di penyalur (SPBU) sering kali habis.

Menanggapi hal tersebut, Komite BPH Migas Ahmad Rizal menyampaikan bahwa kuota JBT untuk minyak solar tahun 2018 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangka. Kuota Minyak Solar untuk tahun 2018 Kabupaten Bangka sebesar 44.882 kiloliter

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung Rabu (30/1), mengadakan kunjungan kerja ke BPH Migas. Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang hadir sebanyak 10 orang dari Komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III H. Hendra Yunus S.E. Rombongan diterima oleh Komite BPH Migas Ahmad Rizal dan Muhammad Ibnu Fajar.



(kl) dengan realisasi sebesar 44.858 Kl (99,95%) dan untuk tahun 2019 kuotanya dinaikkan menjadi 46.461 kl. Terkait keberadaan Pertamina, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya adalah ilegal karena untuk dapat menjual BBM harus punya Izin Usaha Niaga BBM atau menjadi penyalur (SPBU) dari pemegang Izin Usaha Niaga BBM tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibnu Fajar menyarankan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong dan mempercepat pertumbuhan penyalur, mendirikan sub penyalur, dan penyalur mini. ★

Kepala BPH Migas Menjadi Narasumber di Universitas Brawijaya

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menjadi narasumber pada acara Silaturahmi Nasional Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (26/1). Tema pada acara tersebut adalah "Mewujudkan Hukum Nasional yang Religius dan Berkeadilan Sosial".



Salah satu topik yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas pada acara tersebut adalah mengenai Draf Revisi UU Migas yang telah disetujui dalam sidang Paripurna DPR untuk dibahas bersama antara DPR dengan Pemerintah. Salah Satu poin penting dalam Draf UU Migas yang telah disampaikan DPR ke Pemerintah adalah mempertahankan dan memperkuat Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Kelembagaan BPH Migas. ★

Menghadiri Munas IX Hiswana Migas

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menjadi narasumber di Acara Dialog Musyawarah Nasional IX Hiswana Migas di Royal Ambarrumko, Yogyakarta, Kamis (24/1). Tema acara tersebut ialah “Meningkatkan Sinergi dengan *Stakeholder* untuk Memenangkan Persaingan”.

Kegiatan Munas ini dihadiri oleh 8 Dewan Pimpinan Daerah Hiswana Migas, 66 Pimpinan Cabang dengan jumlah Peserta 493 orang dari seluruh Perwakilan Hiswana Migas Indonesia.

Dalam dialognya, Kepala BPH Migas menyampaikan perlu adanya Sinergitas antara BPH Migas dengan Hiswana Migas untuk implementasi menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di desa dan kecamatan di seluruh NKRI dengan konsep Sub Penyalur (JBT & JBKP) dan Mini SPBU (BBM Non Subsidi). ★



FGD Gas Bumi di Sumatera Utara

Komite BPH Migas Hari Pratoyo didampingi Kasubdit Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa Dedy Wijaya menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Masa Depan Gas Bumi Indonesia dan Sumatera Utara”, Kamis (17/1).

Kegiatan tersebut terkait pelaksanaan konversi solar ke gas bumi di pabrik peleburan PT Inalum (Persero) di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas juga berkesempatan melihat langsung proses peleburan timah di Pabrik peleburan Inalum. ★



Pengoperasian Terminal BBM Shell di Gresik

Shell telah mengoperasikan terminal BBM di Gresik dan secara resmi membuka kembali 4 (empat) SPBU, yakni di Jalan Yono Soewoyo dan Jalan Raya Prapen di Surabaya serta di Jalan Raya Waru dan Jalan Diponegoro di Sidoarjo. Acara Peresmian yang dipusatkan di SPBU Shell Yonosowoyo, Surabaya, Kamis (17/1), dihadiri oleh Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar serta Direktur Retail Shell Indonesia Wahyu Indrawanto dan perwakilan Pemerintahan Daerah Jawa Timur.

Dengan dibukanya kembali 4 (empat) SPBU Shell di Jawa Timur ini, jumlah SPBU Shell di Indonesia mencapai 94 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Sumatera Utara, Serta Jawa Timur. ★



Achievment Motivation Training ke-13

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan leadership pegawai, BPH Migas menyelenggarakan Achievment Motivation Training ke-13, Selasa (15/1). Narasumber dalam kesempatan ini adalah Direktur Logistik Supply Chain & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Gandhi Sriwidodo.



Dalam sambutan pembukaan, Komite BPH Migas Sumihar Pandjaitan menyampaikan bahwa Gandhi Sriwidodo merupakan salah satu Indonesia Best CEO 2017 versi majalah SWA. Gandhi Sriwidodo mengawali karier di Pertamina sebagai Sales Representative pada tahun 1991–2003. Jenjang kariernya naik hingga kini menjabat sebagai Direktur Logistik Supply Chain & Infrastruktur Pertamina sejak tahun 2018.

Dengan pengalaman karier yang begitu panjang, maka Gandhi Sriwidodo diundang untuk memberikan training leadership kepada pegawai BPH Migas dengan Tema “Peran Leader dalam Organisasi”. Dalam pemaparannya, Gandhi menyampaikan, values yang harus dimiliki seorang leader adalah clean, integrity, dan fairness.

Selanjutnya, tugas seorang leader adalah membuat organisasi menjadi sehat. Ada 3 karakteristik organisasi menjadi sehat, yaitu tumbuh, produktif, dan berkualitas. Selain itu, ada pula 10 langkah strategis mendaki karier puncak sebagai leader antara lain memperkaya pengetahuan, tingkat keterampilan, etika, hukum, inovatif, memiliki disiplin, dan kehormatan. ★



Kunjungan Kerja ke Stasiun Metering Pertamina Gas Niaga

Komite BPH Migas Hari Pratoyo, didampingi Direktorat Gas Bumi BPH Migas, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Stasiun Metering PT Pertamina Gas Niaga, Jumat (1/2) di Wunut, Sidoarjo, Jawa Timur.



Pada kesempatan tersebut turut hadir juga Presiden Direktur PT Pertamina Gas Niaga Linda Sunarti. Kunjungan kerja ke Stasiun Metering tersebut dalam rangka cek fisik terkait permohonan Hak Khusus

Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi PT Pertamina Gas Niaga guna memastikan seluruh data teknis dan fasilitas pendukung sesuai dengan kondisi di lapangan. ★



Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran Triwulan IV 2018



Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2006, BPH Migas melaksanakan Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran Triwulan IV 2018 terhadap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui Pipa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 29 Januari 2019 hingga 2 Februari 2019 bertempat di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, yang berkesempatan hadir pada acara tersebut, Jumat (1/2), memberikan beberapa arahan di antaranya:

3. Sertifikasi kompetensi petugas verifikator untuk menjamin keahlian dan profesionalitas atas pelaksanaan pekerjaan,
4. Pendekatan pembinaan ke Badan Usaha dan Badan usaha diminta untuk melaporkan data end customer.



1. BPH Migas mulai awal tahun 2019 harus menerapkan e-pnbp,
2. Pelaporan (reporting) Badan Usaha dilaksanakan secara online dan realtime,

Arahan tersebut sebagai bentuk peningkatan pelayanan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka memberikan pelayanan kepada Badan Usaha yang terukur dan berkualitas. ★

Penyaluran LTSHE di Kepulauan Meranti



Kementerian ESDM, diwakili Komite BPH Migas M. Lobo Balia, menyerahkan 211 Unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (6/2).

Penyaluran LTSHE ini merupakan wujud konkret upaya Kementerian ESDM untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satunya adalah penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) adalah lampu penerangan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya. LTSHE ini sangat cocok digunakan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN. ★

Peresmian PJU-TS dan Penyerahan Secara Simbolis Sumur Bor Air Bersih

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, mewakili Kementerian ESDM, menyerahkan secara simbolis sumur bor air bersih di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (20/2). Dalam kesempatan sama, Pemerintah juga meresmikan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).

Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang berasal dari energi terbarukan. Salah satu penyediaan energi terbarukan yang dikembangkan adalah melalui program pemasangan PJU-TS.★





Arahan Menteri ESDM kepada Pegawai BPH Migas

Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan arahan kepada Komite BPH Migas dan seluruh pejabat/pegawai BPH Migas, Selasa (19/2), bertempat di Aula Gedung BPH Migas Jakarta.

Dalam pengarahannya, Jonan menyampaikan bahwa dunia cepat berubah dengan perkembangan teknologi

digital. Oleh karena itu agar kita tidak termakan oleh perkembangan teknologi harus ada inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan mengikuti perkembangan teknologi.

Ignasius Jonan berpesan kepada BPH Migas 2 hal yaitu:

1. Pelayanan kepada *stakeholder* ditingkatkan.

2. Monitoring dan pengawasan Jenis BBM Tertentu/bersubsidi dengan menggunakan Teknologi Informasi secara realtime dan reliable sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. ★



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, didampingi Manager Fuel Retail Marketing Pertamina MOR VIII Fanda Chrismianto dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yalimo, Yosua Kepnop meresmikan Program BBM Satu Harga ke-123 SPBU KOMPAK 86.995.19 Distrik Abenaho, Kab. Yalimo, Provinsi Papua, Selasa (26/2).





Public Hearing Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Pengawasan Investasi Pada Pembangunan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

BPH Migas menyelenggarakan *Public Hearing* Rancangan Peraturan BPH Migas tentang Pengawasan Investasi Pada Pembangunan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Selasa (12/2), bertempat di Hotel Harris and Convention Centre Bekasi.

karenanya, BPH Migas perlu melakukan optimalisasi pengawasan dalam pembangunan pipa pengangkutan gas bumi pada tahap perencanaan, pembangunan dan operasional.

Dalam *public hearing* ini, para pemangku kepentingan telah memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan peraturan sehingga diharapkan peraturan ini dapat diimplementasikan setelah ditetapkan dalam sidang Komite BPH Migas. ★

Acara ini dihadiri oleh beberapa Anggota Komite BPH Migas, seperti Jugi Prajogio, Ahmad Rizal, Hari Pratoyo, dan M. Lobo Balian. Turut hadir juga perwakilan Kementerian ESDM, Puslibang Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, Asosiasi Manajemen Proyek Indonesia, Lemtek UI, dan Badan Usaha yang bergerak dalam

Jasa Konsultan Manajemen Proyek dan Konstruksi.

Kegiatan ini membahas Rancangan Peraturan yang disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan dan wajar. Oleh

Kepala BPH Migas Hadiri Peresmian BBM Satu Harga di Yalimo

Distrik Abenaho masuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Untuk mencapai Distrik Abenaho dari Jayapura, maka perlu menumpang pesawat sekitar 40 menit ke Wamena dilanjutkan dengan Jalan darat sekitar 65 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam atau apabila menggunakan jalur darat dari Jayapura ditempuh selama 2 hari 2 malam.

Kehadiran SPBU Program BBM Satu Harga di Abenaho merupakan titik ke-2 di Kabupaten Yalimo. Sebelumnya pada tahun 2017, BBM 1 Harga telah hadir di Distrik Elelim yang merupakan Ibu kota Kabupaten Yalimo dengan jarak 65 Km dari Distrik Abenaho. Secara keseluruhan saat ini telah beroperasi 26 Penyalur BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat.

Masyarakat menyambut baik dan senang Kehadiran BBM 1 Harga di Distrik Abenaho

ini. Setelah bertahun-tahun membeli bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jayawijaya dengan harga Rp18.000 per liter dan kemudian dijual di wilayah itu dengan harga Rp30.000-Rp 35.000. Kini, masyarakat di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak satu harga, yakni Premium Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150./liter. Dengan kata lain, masyarakat di Distrik Abenaho dapat menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam sambutannya mengungkapkan, ini adalah peresmian ke-123 BBM satu harga di seluruh Indonesia, dari 133 yang sudah dibangun, dengan target 170 lokasi yang akan dibangun sejak tahun 2016 akhir hingga tahun 2019.

SPBU Kompak satu harga ini, kata Fanshurullah, lebih banyak dibangun di wilayah Papua dan Papua Barat dari seluruh Indonesia.

"Ini adalah bagian dari hadirnya sumber energi yang berkeadilan. Apalagi kita tahu wilayah Papua memiliki sumber daya yang cukup besar dan hasilnya banyak digunakan untuk negara ini. Sehingga, pemerintah pusat juga berkomitmen untuk mengembalikan hasil sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar dia. ★

Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi

BPH Migas melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Gas Bumi di dalam Negeri di Hotel Luminor, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (8/2).

Acara ini dihadiri oleh:

1. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio;
2. Komite BPH Migas Ir. Hari Pratoyo, MM;
3. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, ST, MBA;

4. Inspektur V Itjen KESDM Murdo Gantoro, Kabag Perekonomian Pemkab Sidoarjo, Chusnul Inayah, SE; dan
5. Asisten Manajer Operasional EJA PT Pertamina Gas Taufiq Widayat.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio, menyampaikan bahwa BPH Migas merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beliau menolak rencana pembubaran BPH Migas.

Dalam acara ini juga dijelaskan upaya Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi khususnya di Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang telah mencapai 7.093 SR pada tahun 2018. Pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo ke depannya mengharapkan jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR) bisa mencapai 20.000 SR. Sementara mengenai hal tersebut, BPH Migas berkomitmen dalam menetapkan harga Jaringan Gas Bumi supaya di bawah harga LPG 3 Kg. ★



13th Internasional Oil & Gas Conference Petrotech 2019



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono beserta Kasubdit Pengawasan BBM Idham Baridwan menghadiri 13th Internasional Oil & Gas Conference Petrotech 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 Februari 2019 di New Delhi, India. Konferensi tersebut merupakan konferensi bidang hidrokarbon terbesar di India. Pada kesempatan itu, juga diadakan pertemuan bilateral antara delegasi BPH Migas dengan Bharat Petroleum Corporation Ltd, lalu antara BPH Migas dengan Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).

Peresmian BBM Satu Harga di Sumatera Barat



Sebagai langkah kerja nyata dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara nasional sesuai amanah, Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar meresmikan titik ke-118 hingga 121 penyalur BBM Satu Harga di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (25/2).



Saat meresmikan acara tersebut, Arcandra Tahar mengatakan, "Penghematan pengeluaran BBM diharapkan diikuti dengan penurunan harga sembako sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat".

Didampingi Komite BPH Migas Henry Ahmad, Wamen ESDM juga meresmikan dan membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi pemasangan LTSHE sebanyak 1.077 unit yang tersebar di 4 desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Simatalu, Simalegi, Pasakiat Taileleu, dan Sagulebbeg. Saat ini progres pekerjaan pemasangan LTSHE telah terpasang 1.077 unit atau 100%. ★

Dari konferensi tersebut, diketahui perbandingan Data Hilir Migas antara India dengan Indonesia, sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

India : 1,35 miliar orang

Indonesia : 260 juta orang

2. GDP per kapita

India : USD1,942

Indonesia : USD3,846

3. SPBU (Penyalur BBM)

India : 62.585 bh (menyediakan Compressed Natural Gas [CNG] sebanyak 1.424 bh

Indonesia : 7.400 bh (menyediakan CNG sebanyak <10 bh)

4. Harga BBM

India :

Solar Rp. 13.178/ltr

RON 91 sd 97 (setara dengan

Pertamax ke atas) Rp. 14.126/ltr

CNG untuk kendaraan Rp. 8.690/LSP

Indonesia :

Solar Rp. 5.150/ltr

RON 88 (Premium) Rp. 6.450/liter

RON 95 (Pertamax Turbo) Rp. 12.000/iter

CNG/BBG untuk kendaraan Rp. 3.100/ LSP

5. Produksi kilang untuk BBM (Refinery)

India : 5 juta barel per hari

Indonesia : 800 ribu barel per hari. ★



Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Sriwidjaja

Tim Direktorat Gas Bumi, dipimpin Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, melakukan kunjungan terkait kegiatan penyaluran gas bumi ke PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/2). Tim BPH Migas diterima oleh Dirut Pusri Mulyono Prawiro beserta Dirtek Pusri Listiawan Adi Pratisto, yang kemudian menyampaikan profil terkait perusahaan, kedudukan Pusri sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia dan perkembangan Pusri dari mulai didirikan sampai dengan beroperasinya pabrik Pusri-2B yang baru.



Pusri memiliki pabrik amoniak, pabrik urea yang terdiri dari pabrik P-IB, IIB, III & IV. Pusri juga memiliki pabrik NPK. Pusri saat ini sedang membangun pabrik NPK 2 yang diperkirakan akan onstream pada bulan Oktober 2019. Adapun harga gas pada Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) yang dimiliki Pusri saat ini mengakomodir PP No. 40 tahun 2016.

Dengan kunjungan tersebut, Pusri menyampaikan harapannya terhadap BPH Migas dalam hal penentuan tarif pengangkutan gas ruas Grissik-Pusri yang akan ditetapkan BPH Migas, sebagai berikut:

1. Penetapan tarif *toll fee* memperhatikan alokasi Pusri sebesar 70 MMSCFD sehingga investasi untuk pipa 20

inci (untuk volume 158 MMSCFD yang semula diperuntukkan untuk Pusri, PLN & Pertamina) tidak semua dibebankan ke Pusri sebagai *Shipper* awal;

2. Harga gas di *Plant Gate* Pusri sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas untuk industri tertentu dan juga mengacu Surat Menteri ESDM Nomor 10135/12/MEM.M/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal penetapan harga gas dari wilayah coridor kepada PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang; dan
3. Penetapan tarif pengangkutan (*toll fee*) ruas Grissik-Pusri menjadi kompetitif sehingga mampu mendukung proses bisnis PT Pusri dalam menjalankan tugas dari Pemerintah untuk turut serta menjaga ketahanan pangan nasional mengingat 70% gas tersebut untuk bahan baku pupuk urea. ★



Koordinasi Kuota BBM Subsidi Kereta Api di Tanjung Karang

Dalam rangka Koordinasi terkait Kuota BBM Subsidi untuk sektor pengguna PT KAI (Persero) Tahun 2019, BPH Migas melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang, Lampung, Kamis (14/3).

Tim BPH Migas yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, didampingi Kasubdit Pengaturan BBM I Ketut Gede Aryawan, melakukan rapat koordinasi dengan Manager Sarana PT KAI (Persero) Agus Nadi.

Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menyampaikan bahwa penyaluran kuota BBM subsidi (JBT) yang ditetapkan oleh BPH Migas untuk PT KAI (Persero) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena

itu, perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi realisasi penyaluran secara intensif agar kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas dapat tepat sasaran dan volume.

Divisi Regional IV Tanjung Karang memiliki 3 titik pengisian BBM untuk melayani 106 Lokomotif dan 2 KRDI. ★



Kunjungan Lapangan ke SPBB Muara Baru

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, didampingi Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, melakukan kunjungan lapangan ke Depo Bunker/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Muara Baru dan Depo Bunker/SPBB Muara Angke PT AKR Corporindo Tbk di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/3).

Depo Bunker/SPBB yang dioperasikan oleh PT AKR Corporindo Tbk ini, bekerja sama dengan PT Surya Arta Globalindo selaku marketing associate, berjualan Bio Solar Industri (Non Subsidi) dengan total kapasitas penyimpanan 90 kl. Depo Bunker/SPBB yang telah beroperasi sejak 2015 ini memiliki jam operasional pada pukul 07.00 sampai 22.00 WIB untuk melayani kapal-kapal nelayan di Jakarta Utara. ★



Koordinasi Kuota BBM Subsidi bagi Pengguna Kereta Api

Dalam rangka Koordinasi terkait Kuota BBM Subsidi untuk sektor pengguna PT KAI (Persero) Tahun 2019, BPH Migas melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan di kantor pusat PT KAI (Persero) di Bandung, Jumat (8/3).

Tim BPH Migas yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI (Persero) Bambang Eko Martono dan Asisten Manajer Inmar PT Pertamina (Persero) Jody.

Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menyampaikan bahwa penyaluran JBT

kepada sarana perkeretaapian harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi realisasi penyaluran secara intensif agar target terhadap kuota yg telah ditetapkan dapat tercapai. ★



FGD Pengaturan Mini Penyalur dan Sub Penyalur

BPH Migas menyelenggarakan acara Focus Group Discussion Pengaturan Mini Penyalur dan Sub Penyalur di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (1/3). Acara dibuka oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Asisten EP Setda Singkawang Bujang Sukri, dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Anggota Komisi VII DPR Katherine A. Oendoen;
2. Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian BBM BPH Migas Litawati;
3. Biro Hukum Kementerian ESDM Muhidin;
4. ranch Manager Kabarteng PT Pertamina MOR VI M. Ivan Syuhada; dan
5. Perwakilan PT AKR Bram H.

Dengan pelaksanaan acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait implementasi pendirian Sub Penyalur dan Mini Penyalur sehingga penyediaan dan pendistribusian BBM menjadi lebih terjangkau. ★





Peresmian Jaringan Gas untuk Rumah Tangga di Deli Serdang

Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar meresmikan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (6/3).



Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring, Komite BPH Migas Hari Pratoyo, dan Wakil Kepala SKK Migas Sukandar.

Dalam sambutannya, Wamen ESDM menyampaikan bahwa di Kabupaten Deli Serdang telah dibangun sebanyak 5.560 sambungan rumah (SR) yang akan dioperasikan oleh PT PGN dengan harga Rp4.250/m3. Harga ini masih di bawah harga pasar Gas LPG 3 Kg. Menurutnya, semakin banyak pemasangan jaringan gas rumah tangga, maka akan mengurangi impor LPG. ★

RDP dengan Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR RI, Senin (18/3), mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT AKR Corporindo dan Badan Usaha Niaga Gas dan BBM dengan agenda:

1. Pengawasan dan pengaturan distribusi BBM di luar SPBU
2. Penyediaan Premium di Wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan luar Jamali

3. Progres izin-izin pipa transmisi gas bumi dan wilayah usaha gas bumi sampai dengan tahun 2019
4. Lain-lain

RDP dan RDPU dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan terbuka untuk umum. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa pada kesempatan RDP tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan rapat pimpinan, Menteri ESDM Igansius Jonan menegaskan,

agar Badan Usaha yang tidak menghadiri verifikasi dan membayar iuran untuk diusulkan dicabut izin usahanya. Oleh karena itu, BPH Migas akan mengusulkan pencabutan izin usaha Badan Usaha tersebut kepada Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2006.

Pada kesempatan tersebut, Fanshurullah Asa juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 BPH Migas telah menyetorkan PNBP ke Kas Negara sebesar Rp1,35 triliun atau 142,21% dari target Rp950 miliar. PNBP tersebut berasal dari iuran Badan Usaha Niaga BBM dan Badan Usaha Niaga dan atau Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, selain itu juga dari kegiatan pengawasan bersama Kepolisian RI sejak tahun 2016 telah menyelamatkan BBM bersubsidi sebanyak 6,39 juta kl dengan potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp72,35 miliar. ★



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id